



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2022



Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja kementerian perindustrian setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021, Kementerian Perindustrian perlu menyesuaikan rencana strategis periode 2020-2024 dengan mengacu kepada perubahan tersebut. Perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 disusun dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang RIPIN 2015-2035, Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta rancangan teknokratik KIN 2020-2024.

Perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 juga disusun dengan memperhatikan perubahan outlook kondisi perekonomian dengan adanya pandemi Covid-19, dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, maka apabila diperlukan akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tanpa mengubah visi dan misi Kementerian Perindustrian 2020-2024.

Perubahan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 diharapkan akan mampu meningkatkan sinergitas perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan pada masing-masing indikator kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Kemenperin 2020-2024. Diharapkan renstra ini dapat menjadi acuan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk dapat bersinergi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan industri yang tepat sasaran.

Jakarta, 3 Januari 2022

Menteri Perindustrian

ttd.

Agus Gumiwang Kartasasmita



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 15
TAHUN 2020 RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2020-2024**

i

ii

iv

xii

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Kondisi Umum	2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan	5
Pembangunan Industri	
Aspirasi Masyarakat	14
B. Potensi dan Permasalahan	15
Potensi	15
Permasalahan	15

**BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
STRATEGIS**

A. Visi	18
B. Misi	18
C. Tujuan	19
D. Sasaran Strategis	19
Perspektif Pemangku Kepentingan	20
Perspektif Pelanggan	20
Perspektif Proses Internal	22
Perspektif Pembelajaran Organisasi	23



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

25

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	26
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	30
Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri	31
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	33
Kebijakan Pemberdayaan Industri	35
Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri	37
Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal	38
Kebijakan Reformasi Birokrasi	38
C. Kerangka Regulasi	41
D. Kerangka Kelembagaan	42

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

45

A. Target Kinerja	46
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	46
Indikator Kinerja Program	48
Indikator Kinerja Kegiatan	48
B. Kerangka Pendanaan	48

BAB V PENUTUP

49

LAMPIRAN

51

Bagan 1 Pohon Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024	52
Tabel 1 Matriks Kinerja dan Anggaran Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024	54
Tabel 2 Matriks Keterkaitan Kemenperin Tahun 2020-2024	103
Tabel 3 Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024	116



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenperin 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Kemenperin 2020-2024.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 478

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
 - 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
 - 2. Aspirasi Masyarakat
- B. Potensi dan Permasalahan
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan.
- D. Sasaran Strategis
 - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)
 - 2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)
 - 3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
 - 4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
 - 1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri
 - 2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
 - 3. Kebijakan Pemberdayaan Industri

4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja:
 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 2. Indikator Kinerja Program
 3. Indikator Kinerja Kegiatan
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024

TABEL 1 MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN
2020-2024

TABEL 2 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020—2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta untuk penyesuaian sasaran strategis, indikator, dan target indikator kinerja pada rencana strategis Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penyelarasan atas rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 telah mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan surat nomor B.739/M.PPN/D.1/PP.03.02/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 hal Persetujuan atas Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020—2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020—2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Seluruh unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun rencana strategis tahun 2020—2024 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2020—2024.
- (2) Unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan rancangan rencana strategis tahun 2020—2024 kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan untuk ditelaah.
- (3) Unit pelaksana teknis dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui pimpinan unit pembina menyampaikan

rancangan rencana strategis tahun 2020—2024 kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan untuk ditelaah.

- (4) Rencana strategis yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan matriks keterkaitan yang berisi:

- a. sasaran strategis;
- b. indikator kinerja;
- c. klasifikasi rincian *output*;
- d. rincian *output*; dan
- e. aktivitas/komponen kegiatan,

pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada Renstra Kemenperin 2020—2024.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pimpinan unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1430

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Reby Seryo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2020—2024

RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
2. Aspirasi Masyarakat

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi
2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Sasaran Strategis

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Pelanggan
3. Perspektif Proses Internal
4. Perspektif Pembelajaran Organisasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri

2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
 3. Kebijakan Pemberdayaan Industri
 4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri
 5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
 6. Kebijakan Reformasi Birokrasi
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
2. Indikator Kinerja Program
3. Indikator Kinerja Kegiatan

B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

TABEL 1 MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN
TAHUN 2020—2024

TABEL 2 MATRIKS KETERKAITAN KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

TABEL 3 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—
2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Febby Setyo Hariyono



BAB I

PENDAHULUAN

A Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, mengamanatkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1 Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2 Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3 Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4 Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6 Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7 Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015–2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan

secara selektif melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri

dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025—2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020—2024 serta dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode

1

Penguatan Struktur Industri Dilaksanakan Melalui:

- Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
- Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- Mendesain ulang zona industri nasional; dan
- Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.

tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020—2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

2

Penguasaan Teknologi

- Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
- Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
- Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- Pengembangan Industri Hijau.

3

Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Untuk mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020—2024 dan RPJMN 2020—2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020—2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. Pelayanan Legislasi, Advokasi, dan Diseminasi;
 - b. Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokoleran serta Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - c. Pengelolaan Organisasi dan SDM;
 - d. Pengelolaan Keuangan dan BMN;
 - e. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan;
 - f. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
 - g. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - h. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - i. Pengembangan Industri Produk Halal;
 - j. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro;
 - k. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - l. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - m. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka;
 - n. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
 - o. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
 - p. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
 - q. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;
 - r. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal;
 - s. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri;
 - t. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional; dan
 - u. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro;
 - b. Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro;
 - c. Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro;
 - d. Pengembangan Standar Industri Agro;
 - e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro;
 - f. Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Agro;
 - g. Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro;
 - h. Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 Industri Agro;
 - i. Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - j. Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - k. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - l. Peningkatan Kerja sama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - m. Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - n. Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri

- 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - o. Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - p. Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - q. Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - r. Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - s. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - t. Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - u. Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - v. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
 - w. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri;
 - x. Pengembangan Industri Hijau;
 - y. Pengembangan Standar Industri;
 - z. Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
 - aa. Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri; dan
 - ab. Pengembangan Perwilayahan Industri.
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan pada tahun 2020—2021 melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau;
 - c. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri;
 - d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar;
 - e. Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand;
 - f. Penelitian dan Pengembangan Industri Agro;
 - g. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - h. Sertifikasi Industri; dan
 - i. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Pelatihan Vokasi Industri;
 - b. Pendidikan Tinggi Vokasi Industri;
 - c. Pendidikan Menengah Kejuruan Industri; dan
 - d. Peningkatan Kompetensi ASN.
- Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020—2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020—2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kemenperin juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.
- Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua adalah bahwa pandemi *Covid-19* ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sedangkan dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan cepat dengan program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan modal usaha pada Usaha Kecil Menengah/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM/UMKM).
- Secara umum, pandemi *Covid-19* telah

berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Kondisi ekonomi nasional dapat di lihat dari beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri nonmigas, maupun *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur.

Dalam rangka pemulihan kondisi pandemi

yang sampai saat ini masih berlangsung dan dalam mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020—2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin periode tahun 2015—2019 dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin tahun 2015—2019. Pada periode tahun 2015—2019, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:

Kondisi Perekonomian Global pada Tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada tahun 2019 merupakan laju pertumbuhan tahunan terendah dalam empat tahun terakhir. Bila dilihat tren perkembangan sejak 2014, laju pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah yang terendah kedua setelah tahun 2015 dalam lima tahun terakhir. Apabila dilihat perkembangannya berdasarkan data triwulanan kumulatif (c-to-c), pada triwulan I tahun 2019 sempat tertinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir tetapi pada triwulan selanjutnya cenderung turun terus sampai akhir tahun 2019. Secara lengkap dapat di lihat pada **tabel 1.1.**

Tabel 1.1
Perkembangan Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulanan 2015-2019 (%)

Tahun	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
2015	4.83	4.78	4.78	4.88	4.88
2016	4.94	5.08	5.06	5.03	5.03
2017	5.01	5.01	5.03	5.07	5.07
2018	5.06	5.17	5.17	5.17	5.17
2019	5.07	5.06	5.04	5.02	5.02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN (lihat Tabel 1.2) mengalami pertumbuhan yang lebih stabil. Sedangkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam mengalami pertumbuhan yang naik-turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

Indonesia tahun 2019 sebesar 5,0% dan pada tahun 2015—2018 masih stabil meningkat hingga level 5,2%, sedangkan Malaysia pada tahun 2015—2019 mengalami pertumbuhan yang naik-turun, sempat tumbuh sebesar 5,7% namun pada tahun 2019 turun menjadi 4,5% serta Singapura pada tahun 2017 sebesar 3,7% dan pada tahun 2019 juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 0,5%.

Tabel 1.2
Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara ASEAN

No	Negara	PDB (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Indonesia	4,9	5,0	5,1	5,2	5,0
2	Singapura	2,9	3,0	3,7	3,1	0,5
3	Malaysia	5,0	4,4	5,7	4,7	4,5
4	Thailand	3,1	3,4	4,0	4,1	2,9
5	Vietnam	6,7	6,2	6,8	7,1	6,5
6	Filipina	6,1	6,9	6,7	6,2	5,7

Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020

Pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2019 mayoritas cenderung melemah bila dibandingkan dengan tahun 2017. Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2019 Indonesia hanya kalah dengan Cina dengan pertumbuhan

pada tahun 2019 sebesar 6,1%, bila dilihat dari percepatan pertumbuhan hanya Jepang yang mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan 6 (enam) negara lainnya mengalami perlambatan.

Tabel 1.3
Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara Lain

No	Negara	GDP (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	USA	2,9	1,6	2,4	2,9	2,4
2	Rusia	-2,3	0,3	1,6	2,3	1,1
3	Cina	6,9	6,7	6,8	6,6	6,1
4	Jepang	1,2	0,6	1,9	0,8	0,9
5	Inggris	2,3	1,8	1,8	1,4	1,2
6	Perancis	1,1	1,1	2,3	1,7	1,2
7	Australia	2,5	2,8	2,4	2,7	1,7

Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015—2019 sesuai Produk Domestik

Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 selalu tumbuh. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,07%. Data selengkapnya tersaji pada tabel **tabel 1.4**.

Tabel 1.4

Pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha tahun 2015 – 2019 (Y to Y) tahun dasar 2010 (%)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	3,37	3,92	3,89	3,64
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22
3	Industri Pengolahan	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80
	a. Industri Migas	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,10
	b. Industri Nonmigas	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83
6	Konstruksi	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,54	4,03	4,46	4,97	4,62
8	Transportasi dan Pergudangan	6,71	7,45	8,49	7,06	6,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	5,17	5,41	5,68	5,80
10	Informasi dan Komunikasi	9,70	8,88	9,63	7,02	9,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,58	8,93	5,47	4,17	6,60
12	Real Estate	4,11	4,69	3,60	3,48	5,74
13	Jasa Perusahaan	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,63	3,20	2,05	7,00	4,67
15	Jasa Pendidikan	7,33	3,84	3,72	5,35	6,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,69	5,16	6,84	7,15	8,68
17	Jasa lainnya	8,08	8,01	8,73	8,97	10,55
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 menunjukkan tren pertumbuhan meskipun melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari 17 sektor yang ada, pertumbuhan terjadi di semua sektor kecuali sektor industri migas yang mengalami penurunan sebesar 1,1%. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 10,55%; jasa perusahaan sebesar 10,25%; dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%.

Perkembangan pertumbuhan industri nonmigas Tahun 2019 masih menunjukkan trend perlambatan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tumbuh 4,34% dibanding tahun lalu yang tumbuh 4,77% dan lebih rendah dibanding PDB yang tumbuh sebesar 5,02%.

Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015–2018. Terdapat 7 cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; industri mesin dan perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; industri alat angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; industri barang galian bukan logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan industri barang logam, komputer, barang elektronik,

optik dan peralatan listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh

sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%; industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan industri logam dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99.

Tabel 1.5

Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas 2015 – 2019 menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 (%)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
2	Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52
9	Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03
10	Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13
13	Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43
14	Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17
Industri Pengolahan Nonmigas		5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; industri furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas pada Tahun 2015-2019

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

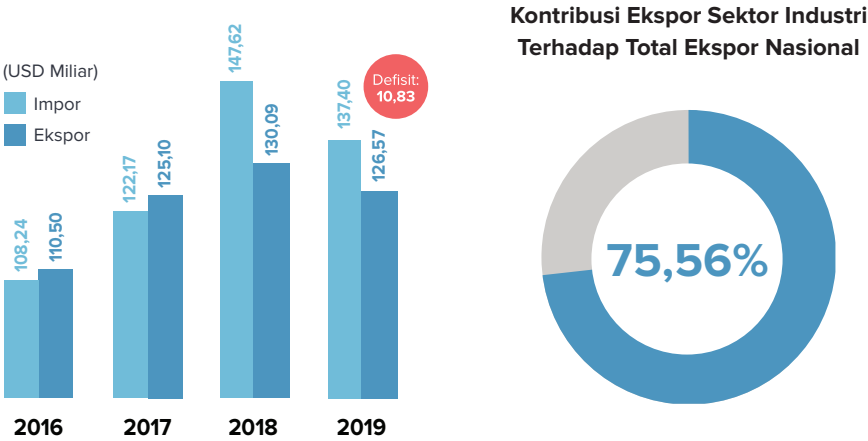
Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,56% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,50 miliar. Berdasarkan **Gambar 1.1**, bila dilihat berdasarkan tahun 2016—2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada

tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar.

Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Cina sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor

dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih di tempati oleh Cina sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar.

Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau sebesar 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau sebesar 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.

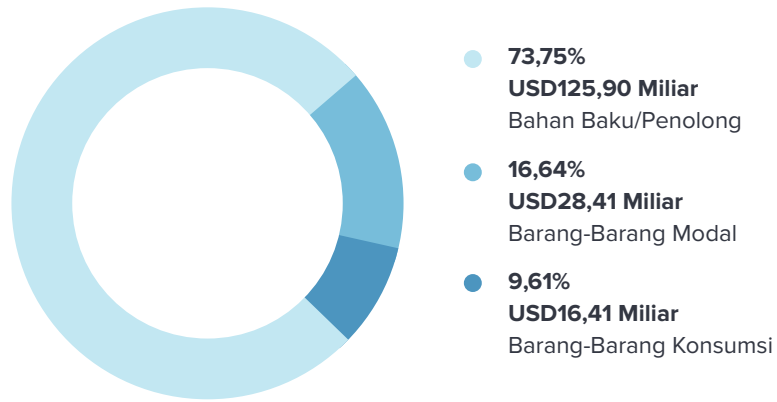


5 Sektor Industri dengan Nilai Terbesar



Sumber: BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.1
Perdagangan Sektor Industri Tahun 2016 - 2019



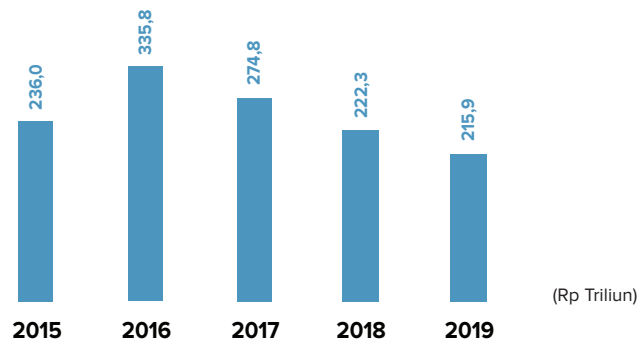
Sumber: BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.2
Impor Indonesia menurut Penggunaan Barang Tahun 2019

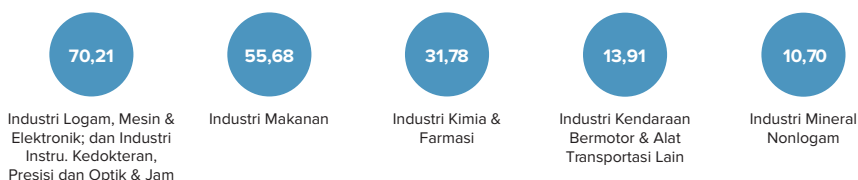
Perkembangan Investasi Indonesia pada Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri mencapai Rp.215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp.222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya kondisi perang dagang

antara Amerika dengan Cina menyebabkan shock sentiment investasi. Investasi terbesar sektor industri di sumbang oleh industri logam, mesin & elektronik dan industri instrumen kedokteran, presisi & optik dan jam sebesar Rp.70,21 triliun dan ditempat kedua terbesar industri makanan sebesar Rp.55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada **gambar 1.3**.



5 Sektor Industri Terbesar



Sumber: BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.3
Investasi Sektor Industri Tahun 2019

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain: harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang dirasa masih kurang kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar AS di pasar global juga menjadi salah satu

penyebab investasi belum mencapai target.

Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform *Online Single Submission* (OSS).

Capaian Kinerja Sasaran sesuai Dokumen Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 Terbagi ke dalam Beberapa Bagian

a. Capaian Peta Strategi Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019

Peta strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015—2019 terbagi ke dalam 1 tujuan dan 3 perspektif, terdapat 261 target indikator kinerja dengan capaian sebanyak 185 target (70,88%) dapat tercapai dan 76 target (25,81%) tidak dapat tercapai.

b. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 dengan 72 target indikator kinerja, capaian akhir sebanyak 44 (61,11%) target indikator kinerja sasaran dapat tercapai dan 28 (38,89%) target indikator kinerja sasaran tidak dapat tercapai.

c. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan 57 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 16 (28,07%) target tercapai dan 41 (71,93%) target belum tercapai.

d. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan 80 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 32 (40%) target tercapai dan 48 (60%) target belum tercapai.

e. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019 dengan 74 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 29 (39,19%) target tercapai dan 46 (35%) target tidak tercapai.

f. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dengan 38 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 11 (28,95%) target dapat tercapai dan 27 (71,05%) tidak tercapai.

g. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional dengan 40 target

indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 23 (57,5%) target dapat tercapai dan 17 (42,5%) target tidak tercapai.

h. Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tahun 2015-2019

Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan 95 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 35 (36,84%) target dapat tercapai dan 60 (63,16%) target tidak tercapai.

i. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan 150 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 99 (66%) target dapat tercapai dan 51 (34%) target tidak tercapai.

j. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dengan 32 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 28 (87,5%) target dapat tercapai dan 4 (12,5%) target tidak tercapai.

k. Capaian Rencana Aksi 10 Industri Prioritas tahun 2015-2019

Selama 2015-2019 terdapat 191 rencana aksi yang harus ditindaklanjuti dimana sebanyak 121 (63%) rencana aksi yang telah dilaksanakan serta 70 (37%)

rencana aksi yang belum dilaksanakan. Pada 10 industri prioritas tersebut masih terdapat 2 industri yang belum dilaksanakan sama sekali, yaitu 7 rencana aksi pada industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan 5 rencana aksi pada industri komponen dan bahan penolong.

l. Capaian kinerja Kerangka Regulasi tahun 2015-2019

Kinerja kerangka regulasi dilihat berdasarkan 66 regulasi yang telah direncanakan akan disusun oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah terdapat 21 (31,82%) regulasi telah selesai, 20 (30,30%) regulasi dalam proses penyelesaian serta 25 (37,88%) regulasi yang telah lewat masa penyusunannya dan masih belum ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak.

m. Capaian anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019

Total rencana anggaran periode 2015-2019 pada Renstra Kementerian Perindustrian adalah Rp 26.822.120 juta, sedangkan total pagu anggaran yang diterima selama periode tersebut Rp. 15.787.619 Juta. Hal ini menunjukkan masih ada *gap* atau selisih sebesar Rp 11.034.501 juta antara rencana anggaran di Renstra Kemenperin dengan nilai pagu yang diterima. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya atau terhambatnya beberapa target kinerja dan terlaksananya rencana aksi.

Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut:

Terkait Tantangan Lingkungan

Tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah perubahan yang begitu cepat, tidak pasti, rumit dan menyebabkan keraguan atau biasa disebut kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity* dan *Ambiguity*). Faktor penyebab terjadinya kondisi ini adalah perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta eningkatnya globalisasi akibat krisis yang terjadi. Akibatnya Kementerian diharapkan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi *outcome/impact* dari suatu kebijakan.

Terkait Data dan Informasi

Data dan informasi sangat penting dalam

pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian diharapkan memiliki data dan informasi khususnya data industri dan kawasan industri yang akurat,

Terkait Kapasitas Kebijakan

Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap *outcome/impact* dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program bukan hanya rutinitas, tanpa perbaikan, inovasi dan terobosan.

Terkait Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik

Prinsip 3E merupakan Ekonomis, Efisien dan Efektivitas. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan hati-hati (input), Efisien berarti menggunakan sumber daya dengan tepat guna (Proses) dan Efektivitas (*Output/Outcome*) berarti tepatsasaran. Implementasi prinsip ini pada seluruh aspek, fungsi dan sistem sangat penting agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



B Potensi dan Permasalahan

Potensi

Potensi Alam Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional.

Dinamika sektor industri

Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.

Kebijakan Otonomi Daerah

Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

Pangsa Pasar Dalam Negeri

Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, *scrap*, kertas bekas, dan nitrogen);
- Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- Kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- Kurangnya tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- Tekanan produk impor;
- Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan
- Logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat).
- Kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perlambatan dan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.

halaman ini sengaja dikosongkan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

B Misi

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden di atas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian

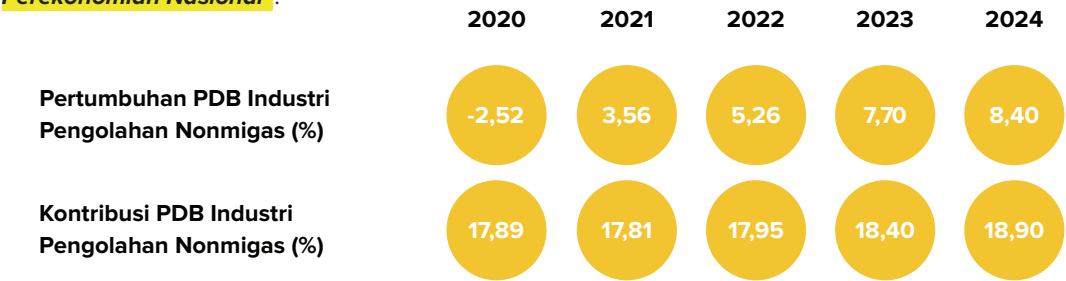
yang tercantum pada Renstra Kemenperin Tahun 2020—2024, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas;
2. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB;
3. Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) $\geq$ 3.0;
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin; dan
5. Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

C Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**.

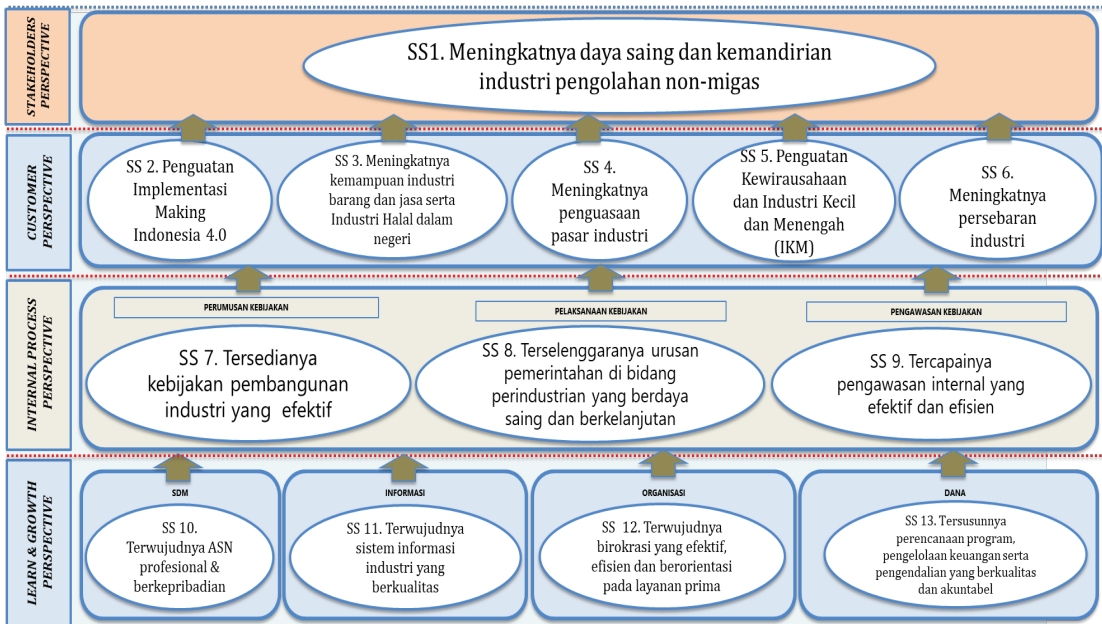
Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja tujuan, yaitu:



D Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu *impact/outcome* dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Internal,

dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Perindustrian

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

- Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17,44 juta orang menjadi sebanyak 21,94 juta orang pada tahun 2024;
- Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13,58 persen menjadi sebesar 15,65 persen pada tahun 2024;
- Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.111,66 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp.124,73 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024;
- Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.245,96 Triliun menjadi Rp.613,85 Triliun pada tahun 2024;
- Peningkatan Utilisasi Sektor Industri pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 61,55 persen menjadi sebesar 77,52

persen pada tahun 2024;

- Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau pada tahun 2020 sebesar 3 persen menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2024;
- Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 50 persen menjadi sebesar 83 persen pada tahun 2024; dan
- Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 17.000 orang menjadi sebanyak 100.000 orang pada tahun 2024.

2. Perspektif Pelanggan

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:

- Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industri 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024;

- b. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 12,78 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024;
- c. Tumbuhnya IKM *startup* berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024;
- d. Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan *Making Indonesia 4.0* dengan target yang sama mulai tahun 2020—2024 yaitu sebesar 1500 IKM; dan
- e. Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020—2024 setiap tahun sebanyak 400 orang.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin pada tahun 2021 sebesar 75 persen menjadi 90 persen pada tahun 2024;
- b. Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 sebesar 14 persen menjadi 35 persen pada tahun 2022 dan dapat dipertahankan sampai tahun 2024;
- c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024;
- d. Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024;
- e. SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024;
- f. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal pada tahun 2020 ditargetkan dapat efektif dengan target skala sebesar 2,75 persen menjadi

sebesar 3,5 persen pada tahun 2024; dan

- g. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi pada tahun 2021 sebesar 60 persen menjadi 75 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 131,08 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,59 Miliar pada tahun 2024;
- b. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,91 persen menjadi tumbuh sebesar 13,05 persen pada tahun 2024;
- c. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 79,85 persen menjadi sebesar 76,49 persen pada tahun 2024;
- d. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024; dan
- e. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 40,22 persen menjadi sebesar 36,12 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, dengan indikator kinerja:

- a. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,50 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024;
- b. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi

sebanyak 20.000 WUB secara kumulatif pada tahun 2024;

- c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 40 IKM menjadi sebanyak 200 WUB pada tahun 2024; dan
- d. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”, dengan indikator kinerja:

- a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI secara kumulatif pada tahun 2024;
- b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI secara kumulatif pada tahun 2024;
- c. Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI;
- d. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024; dan
- e. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.

3. Perspektif Proses Internal

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif”, dengan indikator kinerja:

- a. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024; dan
- b. Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 sebesar 60 persen menjadi 75 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- a. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024; dan
- b. Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 8 SKKNI mulai tahun 2020 dan selanjutnya tahun 2021-2024 dengan target sebesar 10 SKKNI.

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:

- a. Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
- c. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,

dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output*, *outcome*, maupun *impact* dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian” dengan indikator kinerja:

- a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024; dan
- b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80 persen menjadi 90 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas” dengan indikator kinerja:

- a. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 1-4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024; dan
- b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 persen

menjadi 88 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) selalu ditargetkan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2020 sampai tahun 2024; dan
- b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 78 menjadi sebesar 78,8 pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 96,3 persen pada tahun 2024; dan
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 78 tahun 2020 menjadi 78,8 pada tahun 2024.

halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.



Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

AGENDA 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Arah Kebijakan:

a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; dan
- 3) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup;

b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
- 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- 3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- 4) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 5) mengembangkan industri halal;

c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
- 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
- 3) mengelola impor;
- 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; dan
- 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;

d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
- 2) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; dan
- 3) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata.

AGENDA 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan:

Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:

- 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
- 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;
- 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;
- 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
- 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru

dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja.

b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup:

- 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
- 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
- 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
- 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
- 5) pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
- 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; dan
- 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

AGENDA 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah mendorong pembangunan rendah karbon melalui penerapan modifikasi proses dan teknologi untuk meningkatkan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada masa pemulihan sosial-ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor industri.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;

8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Sejalan dengan fokus pengembangan industri nasional tahun 2020—2024 dan berbagai kendala yang ingin diatasi, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian 3 (tiga) aspirasi utama yaitu:

1. peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari PDB;
2. peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya; dan
3. peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB.

Implementasi Inisiatif *Making Indonesia 4.0* lebih difokuskan pada 7 (tujuh) sektor industri, yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan busana;
3. industri otomotif;
4. industri kimia;
5. industri elektronika;
6. industri farmasi; dan
7. industri alat kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. kebijakan pengembangan sumber daya industri;
2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
3. kebijakan pemberdayaan industri;
4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; &
6. kebijakan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri

Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten; dan
- b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran yaitu:
 - 1) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - 2) penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
 - 3) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
 - 4) meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.

Kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:

- a. Pembangunan sumber daya manusia industri.

Untuk meningkatkan kompetensi teknis, pembangunan tenaga kerja industri dilaksanakan melalui 6 kegiatan prioritas yakni:

 - 1) pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system;
 - 2) pembangunan politeknik/akademi komunitas di kawasan industri dan revitalisasi politeknik;
 - 3) pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri;
 - 4) pelatihan industri berbasis kompetensi;
 - 5) pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri; dan
 - 6) pengembangan SDM Industri menuju industri 4.0.

Kompetensi SDM industri juga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dalam rangka menghadapi tantangan era industri 4.0. Dalam rangka pembangunan kompetensi SDM dalam era industri 4.0 dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengembangan online learning;
 - 2) redesain kurikulum dan pengembangan program studi mengacu kompetensi yang relevan di era industri 4.0;
 - 3) pengembangan riset berbasis industri 4.0 pada politeknik;
 - 4) program S2 linkage dengan konsentrasi industri 4.0;
 - 5) pelatihan SDM bidang industri 4.0;
 - 6) pengembangan politeknik mendukung industri 4.0; dan
 - 7) pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam.

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:

 - 1) perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi 7 (tujuh) sektor prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian besar diimpor;
 - 2) pemenuhan kebutuhan energi bagi industri; dan
 - 3) pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di Kawasan Industri.

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:

- 1) Penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor;
- 2) Meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor;
- 3) Meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional;
- 4) Mempercepat proses negosiasi dan review *Free Trade Agreement* (FTA);
- 5) Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi eksportir;
- 6) Meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor; dan
- 7) Memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM.

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- 1) Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem industri 4.0 dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat time-to-market, mass-customization, serta menghasilkan smart products;
- 2) Peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- 3) Adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dan peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
- 4) Implementasi teknologi industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi dan standarisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan OEM, serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
- 5) Kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci, pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan R&D, dan perlindungan produk inovasi dalam pengendalian kebijakan di dalam dan luar negeri;
- 6) Rancang bangun dan perekayasaan industri prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur; dan
- 7) Komersialisasi hasil teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan teknologi.

d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, inkubator bisnis dan pusat pelatihan;
- 2) Pengembangan sentra industri kreatif;
- 3) Pelatihan, bimbingan, atau konsultasi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi;
- 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi; dan
- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif didalam dan luar negeri.

e. Penyediaan sumber pembiayaan.

Dalam hal ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapa program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:

- 1) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja, *buyers credit*, dan asuransi;
- 2) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing;
- 3) kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) berorientasi ekspor;
- 4) kredit modal kerja dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui kredit usaha bagi IKM;
- 5) dana usaha bergulir melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja bagi koperasi dan IKM; dan
- 6) kredit usaha melalui *financial technology (Fintech)* yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM.

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
 - 2) Meningkatkan infrastruktur kompetensi industri.
- b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan

sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.

c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

- 1) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
- 2) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

a. Pengembangan standardisasi industri.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- 1) pengembangan standardisasi industri;
- 2) pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
- 3) penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
- 4) peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
- 5) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

b. Pengembangan infrastruktur industri.

Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain ketersediaan lahan yang *clean and clear*, kecukupan pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang kompetitif. Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:

- 1) Penyediaan lahan industri yang siap digunakan;
- 2) Pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air baku;
- 3) Pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi energi (listrik dan gas) yang mendukung industri;
- 4) Pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi air baku yang mendukung industri;
- 5) Pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- 6) Diversifikasi dan konservasi energi;
- 7) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi;
- 8) Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;
- 9) Penyediaan moda transportasi yang efisien;
- 10) Pengembangan infrastruktur digital nasional serta industri pendukungnya; dan
- 11) Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan telekomunikasi.

c. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Penyelenggaraan SIINas meliputi:

- 1) Pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, serta pengadaan data peluang dan perkembangan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;
- 2) Pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnis yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas;
- 3) Publikasi informasi industri; dan
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah.

3. Kebijakan Pemberdayaan industri.

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

- a. Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - 2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
 - 3) Meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
 - 4) Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM).
- b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya fasilitasi halal dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kebijakan pemberdayaan industri diterjemahkan melalui 6 (enam) kebijakan, yaitu:

- a. Pengembangan industri kecil dan menengah.
Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, program pengembangan IKM pada dalam rangka menghadapi era industri 4.0 difokuskan pada tiga aspek utama:
 - 1) Peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e-business dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultansi bisnis dan pengembangan produk, digitalisasi IKM (aspek internal).
 - 2) Pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan mendukung pemberdayaan melalui layanan pengembangan usaha yang komprehensif (aspek eksternal).
 - 3) Pengembangan pemasok untuk calon investor, dan pelatihan ekspor dan kemitraan pemasaran jangka panjang, serta restrukturisasi kegiatan prioritas pengembangan IKM untuk lebih terintegrasi dalam mendukung pendalaman industri, serta partisipasinya dalam rantai pasok yang lebih luas.
- b. Pengembangan industri hijau.
Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan standar industri hijau;
 - 2) Penguatan infrastruktur industri hijau;

- 3) fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
 - 4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
 - 5) peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
 - 6) promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.
- c. Pengembangan industri strategis.
- Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.
- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.
- e. Kerjasama internasional di bidang industri.
- Kerjasama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.
- f. Pemberdayaan Industri Halal.
- Tantangan pemberdayaan industri halal yang harus segera diselesaikan dari sisi produksi adalah pemanfaatan potensi SDA belum optimal, proses produksi belum efisien, daya saing industri halal nasional belum kompetitif, dan literasi produsen masih rendah terhadap jaminan produk halal. Dari sisi konsumsi, tantangan yang dihadapi adalah tingkat literasi masyarakat rendah terhadap produk non-halal dan turunannya. Dari sisi ekosistem industri halal, beberapa hal yang harus segera diselesaikan yaitu regulasi halal belum lengkap, infrastruktur halal belum memadai secara kualitas dan kuantitas dari tiap rantai nilai, serta riset halal masih tertinggal dalam hal substitusi bahan baku non-halal dan material impor. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri halal dilakukan

melalui:

- 1) kebijakan pemberdayaan industri halal;
- 2) penguatan infrastruktur industri halal;
- 3) fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal industri halal;
- 4) peningkatan rantai nilai, rantai pasok halal dan poros halal; dan
- 5) promosi, sosialisasi, edukasi, dan diseminasi jaminan produk halal.

4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri.

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Keseluruhan WPPI yang berjumlah 22 telah memiliki *master plan* serta telah dikaji kebutuhan infrastrukturnya. Pengembangan WPPI belum didukung oleh perangkat regulasi sehingga pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Guna untuk mengoptimalkan peran dan fungsi WPPI, program pengembangan WPPI diarahkan pada:

- 1) Penyusunan pedoman pengembangan WPPI;
- 2) Diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu terhadap 22 (dua puluh dua) WPPI;
- 4) Redesain zona industri berbasis WPPI;
- 5) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan
- 6) Kerja sama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.

b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Penetapan KPI merupakan inisiatif kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi investasi industri di daerah. Program pengembangan KPI diarahkan pada:

- 1) Koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;
- 2) Reviu Pengembangan KPI;
- 3) Penjaminan pemanfaatan KPI; dan
- 4) Pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI.

c. Kawasan Industri (KI).

Dalam proses pembangunannya KI menemui beberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas, sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan, pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan maupun jaringan) dan *tenant*. Kendala yang dihadapi oleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung dan okupansi lahan. Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensi pengembangan KI tematik di masa depan antara lain: KI Halal, KI khusus

IKM, serta KI Hortikultura.

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, program pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;
 - 2) penataan KI;
 - 3) pembangunan infrastruktur dasar KI; dan
 - 4) pembangunan KI tematik.
- d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM
- Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sentra IKM dilakukan melalui:
- 1) penyusunan pola pengembangan sentra IKM;
 - 2) pengembangan skema kemitraan antara sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan *captive market* terhadap produk-produk sentra; dan
 - 3) penyebaran pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- b. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
- c. Meningkatnya penguasaan pasar industri.

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui empat fokus kegiatan utama, yaitu:

- a. upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten);
- b. upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri *existing* yang melakukan perluasan komoditi baru;
- c. upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru; dan
- d. upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien;
- b. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian; dan
- c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan RB tahun 2020—2024 merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri.

Dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM;
- f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- h. Penguatan Pengawasan.

Pada awal periode perencanaan jangka menengah tahun 2020—2024 terjadi pandemi *Covid-19* yang sedang melanda dunia, pandemi tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan migas yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi juga ikut terdampak. Dalam mengantisipasi efek negatif yang kemungkinan muncul dari pandemi, Kementerian Perindustrian telah melakukan tindakan melalui aturan/regulasi yang disusun untuk menjamin industri dapat tetap beroperasi dengan tetap mematuhi/menjalankan protokol kesehatan, antara lain:

- a. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease* 2019;
- b. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease (Covid-19)*;
- c. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri;
- d. Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penguatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
- e. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
- f. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan *Covid-19*; dan
- g. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan *Covid-19*.

Kementerian Perindustrian secara cepat telah mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan aturan-aturan berupa arah kebijakan/strategi dalam rangka menghadapi pandemi serta melakukan akselerasi program/kegiatan untuk segera membangkitkan kembali sektor industri yang terdampak.

Untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020—2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni:
 - a. RUU tentang Bahan Kimia.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni:
 - a. RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
 - b. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
 - c. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
 - d. RPP tentang Industri Maritim;
 - e. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
 - f. RPP tentang Perwilayahan Industri; dan
 - g. RPP tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

3. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), yakni:

- a. Rperpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci;
- b. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024;
- c. Rperpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional; dan
- d. Rperpres tentang Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Kementerian Perindustrian menargetkan untuk dapat menyusun 1 (satu) undang-undang, 7 (tujuh) peraturan pemerintah, dan 4 (empat) peraturan presiden, sehingga total terdapat 12 (dua belas) produk hukum yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2020—2024. Jangka waktu penyelesaiannya beragam, yaitu: 3 (tiga) peraturan pada tahun 2020, 2 (dua) peraturan pada tahun 2021, 4 (empat) peraturan pada tahun 2022, 2 (dua) peraturan pada tahun 2023, dan 1 (satu) peraturan pada tahun 2024. Secara lebih jelas dapat di lihat pada **tabel 3.1**.



Tabel 3.1
Matrik Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia	Sinergi Kebijakan antar K/L terkait peredaran bahan kimia di dalam negeri	Ditjen IKFT	Dit. IKHu	2024
2	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar	Mengatur Izin Produksi, Penyimpanan, Transportasi, penanganan, ekspor impor bahan kimia daftar	Ditjen IKFT	Dit. IKHu	2020
3	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99	Ditjen KPAIL	Dit. KIUI	2023
4	RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035	Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Setjen	Biro Perencanaan	2022
5	RPP tentang Industri Maritim	Amanat Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen ILMATE	Direktorat IMATAP	2022
6	RPP tentang Perubahan atas PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Amanat PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ditjen KPAIL	Dit. PI	2022
7	RPP tentang Perwilayahan Industri	Amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat 4	Ditjen KPAIL	Dit. PI	2022
8	RPP tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Setjen	Biro Hukum	2021
9	RPerpres tentang Kebijakan Nasional Tahun 2020 – 2024	Amanat PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035	Setjen	Biro Perencanaan	2020
10	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	BSKJI	Pusat OPTIKJI	2021
11	RPerpres tentang Kementerian Perindustrian	Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara	Setjen	Biro Hukum	2020
12	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Implementasi Peta Jalan Making Indonesia 4.0	Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Penerapan Peta Jalan Industri 4.0	Setjen	Biro Perencanaan	2023

D Kerangka Kelembagaan

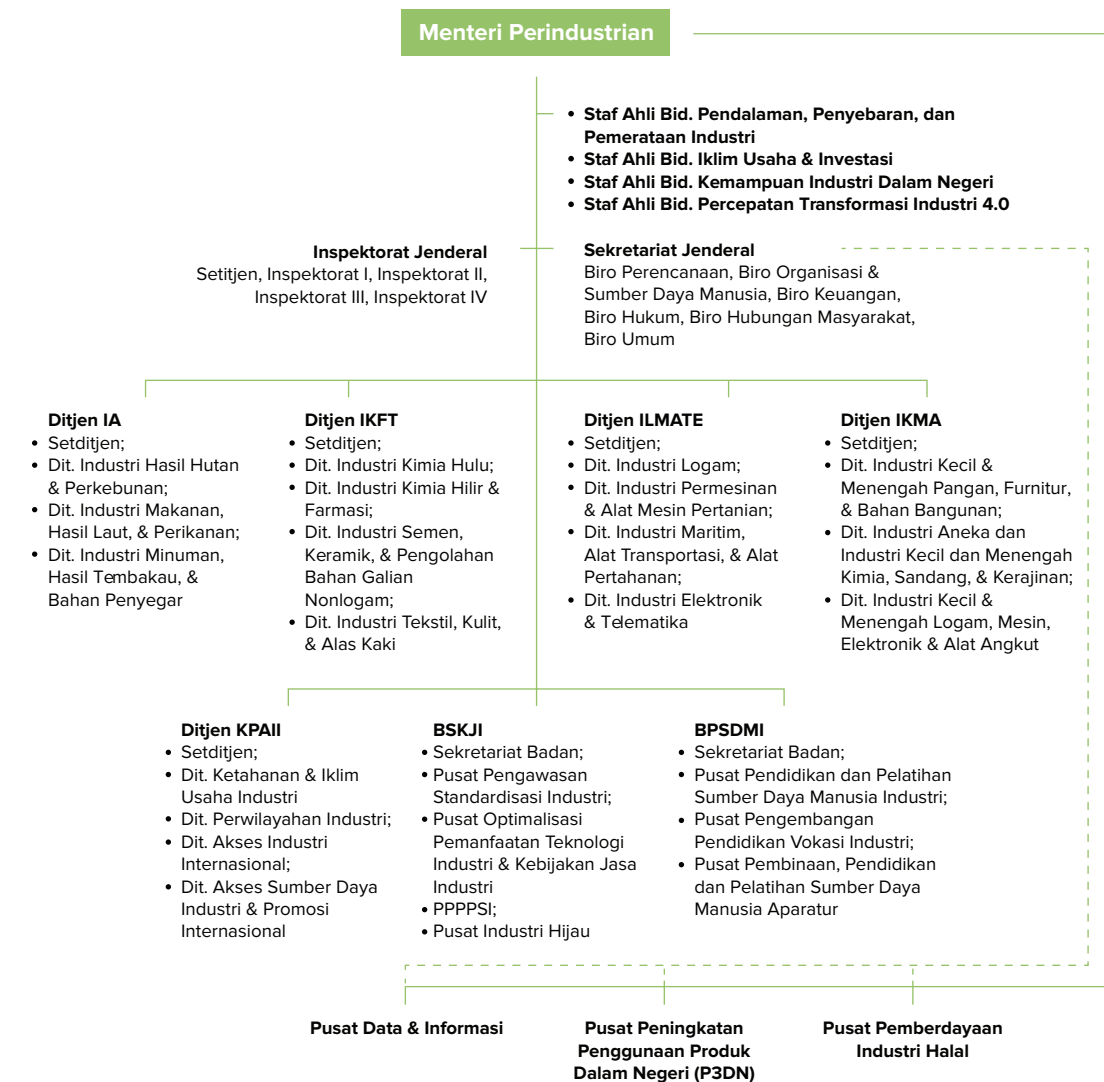
Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang

selanjutnya di tindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap nomenklatur eselon I dan tugas dapat di lihat pada **tabel 3.2** dan **gambar 3.1**.

Tabel 3.2

Nomenklatur Unit Kerja Eselon & Tugas di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024

No	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I Tugas	Tugas
1	Direktorat Jenderal Industri Agro	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.
2	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
3	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
4	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah.
5	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
7	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
8	Sekretariat Jenderal	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9	Inspektorat Jenderal	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10	Staf Ahli Menteri	Memberikan rekomendasi strategis terhadap isu-isu kepada Menteri terkait dengan bidang: a. Pendalaman, penyebaran, dan pemerataan industri; b. Iklim usaha dan investasi; c. Penguatan kemampuan industri dalam negeri; dan d. Percepatan transformasi Industri 4.0



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Penataan kelembagaan Kementerian Perindustrian selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan

kelembagaan unit pelaksana teknis di daerah serta penguatan kapasitas sumber daya manusia terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A Target Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020—2024, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian

Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN							
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional						
1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	-2,52	3,56	5,26	7,70	8,40
2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,89	17,81	17,95	18,40	18,90
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp Juta/ orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	245,96	255,29	334,90	544,59	613,85
5	Utilisasi Sektor Industri	Persen	-	61,55	64,46	69,86	77,52
6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7
7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83
8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
SS2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70
3	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)
4	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	IKM	1500	1500	1500	1500	1500
5	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400
SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri						
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90
2	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	14	22	35	35	35
3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0
4	Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)
5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20
6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5
7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU/ IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	131,08	134,21	145,50	160,64	181,59
2	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05
3	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49
4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32
5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	40,22	39,07	38,05	37,08	36,12
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20
2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000
3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	40	80	120	160	200
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri						
1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)
4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif						
1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80
2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	60	65	70	75
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan						
1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)
2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	8	10	10	10	10
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	70	71	73	76	80
2	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU/ IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8

Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Kemenperin 2020–2024 telah

ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pohon kinerja keterkaitan antara RPJMN 2020—2024 dengan Renstra Kemenperin Tahun 2020—2024 sebagaimana tercantum dalam **bagan 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan. Pedoman kinerja Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum pada **tabel 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 adalah:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 (Rp Miliar)

No.	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	204	1.781	1.452	570	570
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	606	515	662	3.445	3.445
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	563	53	-	-	-
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	735	651	497	985	985
TOTAL		2.108	3.000	2.611	5.000	5.000

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran

sebagaimana terdapat pada **tabel 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020—2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020—2024. Renstra Kemenperin merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;
2. Perspektif Pelanggan;
3. Perspektif Proses Internal; dan
4. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 3 (tiga) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional.

Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020—2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi *Making Indonesia 4.0* lebih difokuskan pada 7 (tujuh) sektor industri, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman;
2. Industri tekstil dan busana;

3. Industri otomotif;
4. Industri kimia;
5. Industri elektronika;
6. industri farmasi; dan
7. industri alat kesehatan.

Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

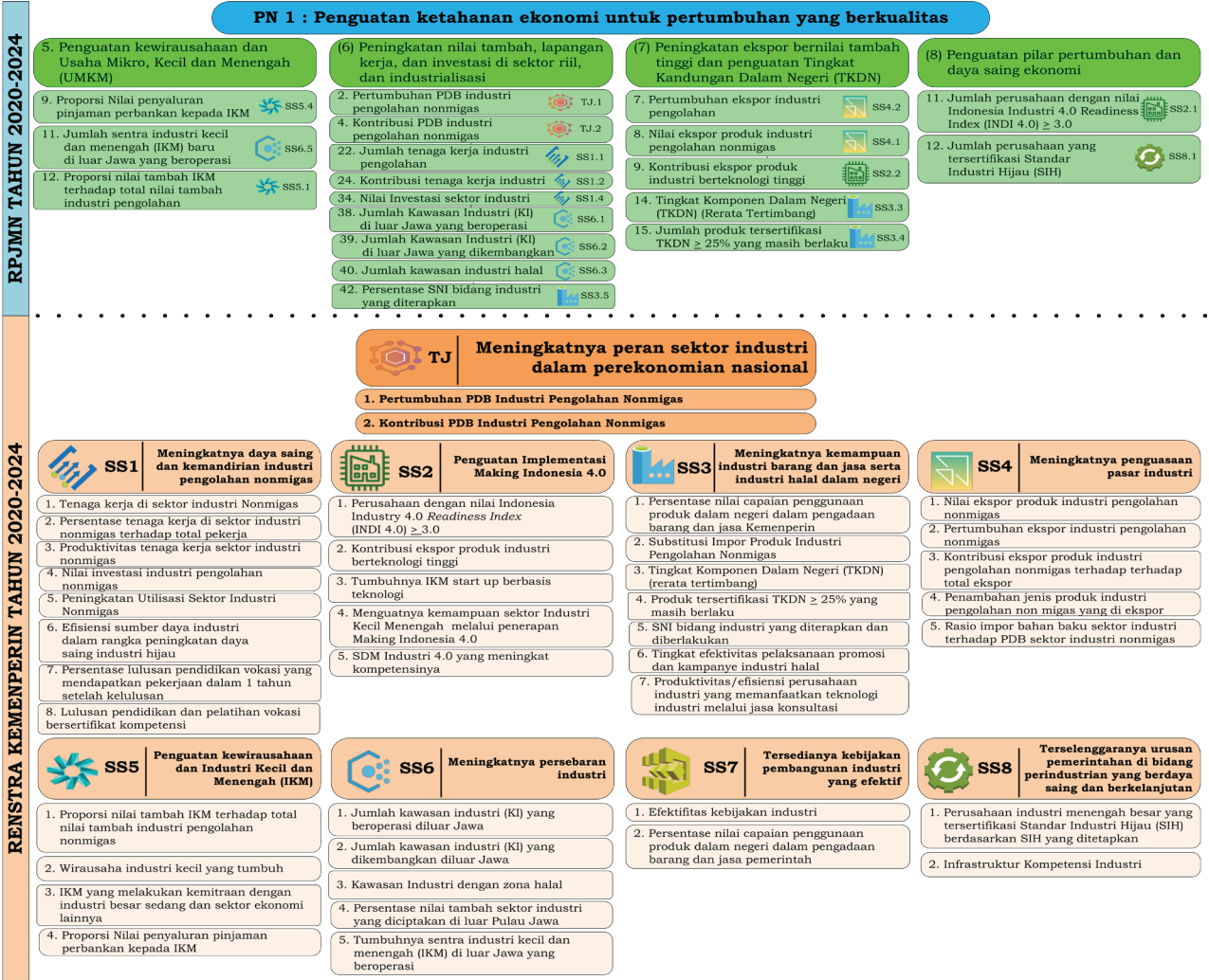
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/ Lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

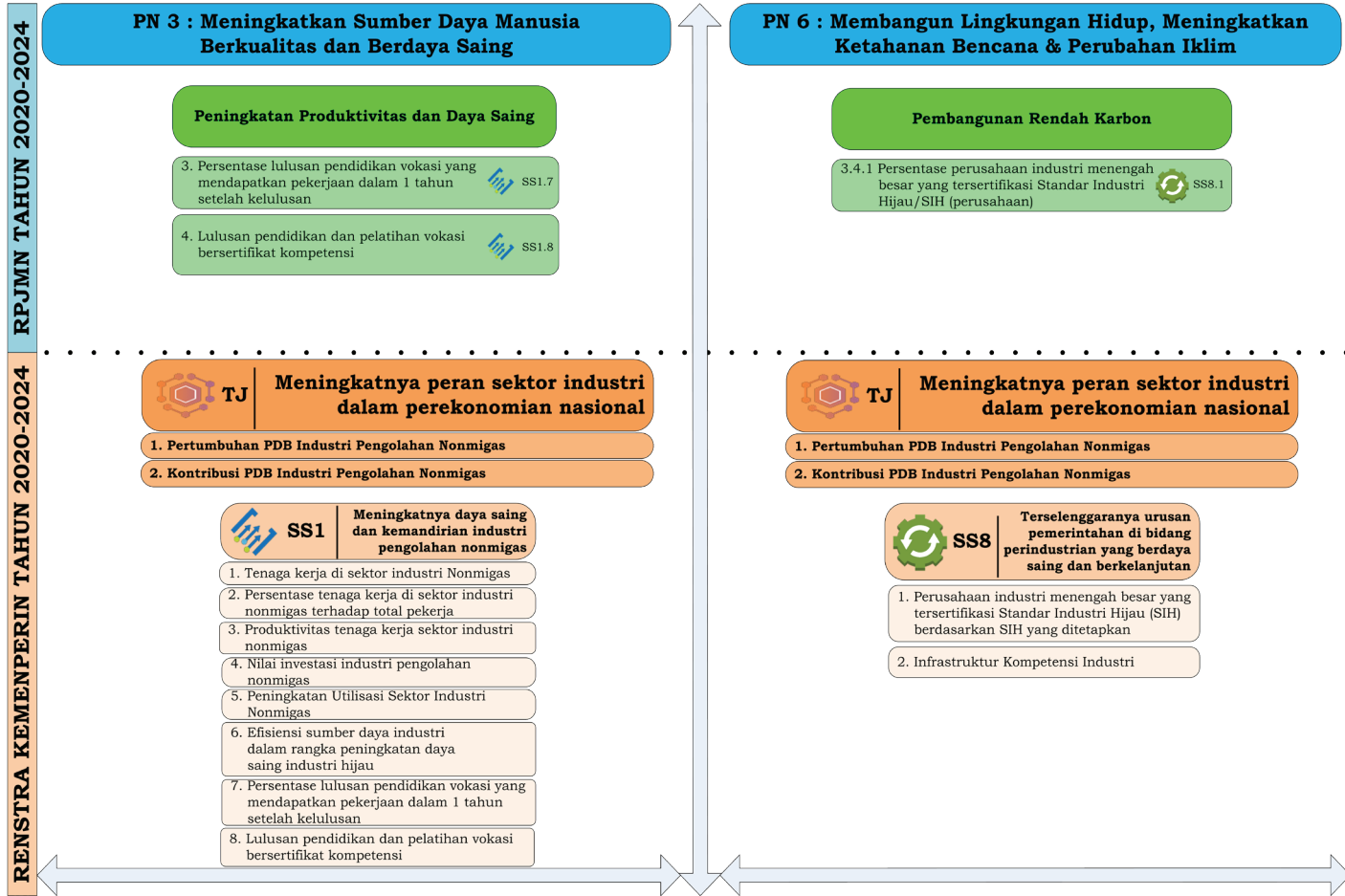


LAMPIRAN

Bagan 1

Pohon Kinerja Renstra Kemenperin 2020-2024





Tabel 1
Matrik Kinerja dan Anggaran Renstra Kemenperin 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN								2.108	3.000	2.861	5.000	5.000	
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	-2,52	3,56	5,26	7,70	8,40						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,89	17,81	17,95	18,40	18,90						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						BPSDMI
2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						BPSDMI
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp Juta/ orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						BPSDMI
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	245,96	255,29	334,90	544,59	613,85						IA, ILMATE, IKFT, IKMA dan KPAII
5	Utilisasi Sektor Industri	Persen	-	61,55	64,46	69,86	77,52						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						BSKJI
7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						BPSDMI
8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000						BPSDMI
SS2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>												
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60						IA, ILMATE, dan IKFT
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
3	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)						IKMA
4	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	IKM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						IKMA
5	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon I
	2	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	14	22	35	35	35						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
	3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	4	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7130	7640	8.400 (kumulatif)						Setjen
	5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20						BSKJI
	6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5						Setjen
	7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75						BSKJI
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
	1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	131,08	134,21	145,50	160,64	181,59						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	2	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	3	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32						KPAII
	5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	40,22	39,07	38,05	37,08	36,12						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20						IKMA
	2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000						IKMA
	3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	40	80	120	160	200						IKMA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5						IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri													
1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)							KPAII
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)							KPAII
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)							KPAII
4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1							KPAII
5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44							IKMA
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif													
1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80							Semua Unit Eselon I
2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	60	65	70	75							Setjen
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan													
1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)							BSKJI
2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	8	10	10	10	10							BPSDMI
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1							Itjen
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93							Semua Unit Eselon I
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4							Semua Unit Eselon I
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian													
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	70	71	73	76	80							Semua Unit Eselon I
2	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90							BPSDMI
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas													
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	-	-	-	-	-	-	Setjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88						Setjen
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
	1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Setjen
	2 Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8						Setjen
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel												
	1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3						Setjen
	2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8						Semua Unit Eselon I
Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian								204	1.781	1.408	2.000	2.000	
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien												
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8						Semua Unit Eselon I
	2 Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80						Semua Unit Eselon I
	3 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8						Setjen
SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	75	-	-	-						Setjen
	2 Produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	-	-	-						Setjen
	3 Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	-	-	-						Setjen
	4 Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	Persen	NA	25	50	75	100						Setjen
SP3	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri												
	1 Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan internal	Skala (1-4)	2,8	2,81	2,82	2,83	2,85						Setjen
	2 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian	Nilai	80	81	82	83	84						Setjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP4	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1						Itjen
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2						Itjen
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100						Itjen
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Semua Unit Eselon I
SP5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik												
	1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74						Itjen
	2 Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4						Semua Unit Eselon I
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								606	515	957	2.100	2.100	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
	1 Utilisasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	NA	61,55	64,46	69,86	77,52						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	245,96	255,29	334,90	544,59	613,85						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	3 Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						BSKJI
	4 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60,00	65,00	70,00	75,00						BSKJI
	5 Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal	Rp. Triliun	140	246	258	272	288 (kumulatif)						KPAII
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)						IKMA
	4 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	IKM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	5 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembinaan, pendampingan industri 4.0	Persen	NA	5	10	15	20						BSKJI
SP3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri													
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon I
	3 Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	14	22	35	35	35						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
	4 Produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	Produk	NA	NA	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)						Setjen
	5 SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	NA	NA	10	15	20						BSKJI
	6 Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	NA	3	3,25	3,5						Setjen
	7 Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	NA	85	87	90	95						BSKJI
	8 Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	Persen	NA	NA	70	75	80						BSKJI
SP 4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
	1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	40,22	39,07	38,05	37,08	36,12						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32						KPAII
	5 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	131,08	134,21	145,50	160,64	181,59						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
SP 5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20						IKMA
	2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000						IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	40	80	120	160	200						IKMA
	4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5						IKMA
SP6	Meningkatnya Persebaran Industri												
	1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)						KPAII
	2 KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)						KPAII
	3 KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)						KPAII
	4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1						KPAII
	5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44						IKMA
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								563	53	-	-	-	
SP1	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri												
	1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	NA	NA	NA	NA						BSKJI
	2 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	NA	NA	NA	NA						BSKJI
SP2	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ di harmonisasi	Persen	50	100	NA	NA	NA						BSKJI
SP3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Persen	9	9	NA	NA	NA						BSKJI
	2 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	NA	NA	NA						BSKJI
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								735	651	496	900	900	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						BPSDMI
	2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp Juta / orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						BPSDMI
4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27600	95.000	100.000						BPSDMI
5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						BPSDMI
SP2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	21	21	21	21	21						BPSDMI
2	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						BPSDMI
SP3 Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri													
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12						BPSDMI
2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						BPSDMI
3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						BPSDMI
4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						BPSDMI
SP4 Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri													
1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10						BPSDMI
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20						BPSDMI
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320						BPSDMI
SP5 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian													
1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90						BPSDMI
2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Persen	0	70	75	80	85						BPSDMI
Sekretariat Jenderal								174	336	251	423	423	
Tujuan Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif													
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8						Rokeu

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8						Rocana
	2	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80						Rokum
	3	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	60	65	70	75						Rokum
SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon II Setjen
	2	Produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7130	7.640	8.400 (kumulatif)						P4DN
	3	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5						PPIIH
	4	Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	Persen	NA	25	50	75	100						PPIIH
SP3	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri													
	1	Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan internal	Skala (1-4)	2,8	2,81	2,82	2,83	2,85						Pusdatin
	2	Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian	Nilai	80	81	82	83	84						Humas
SP4	Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana kemenperin yang efektif dan efisien													
	1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Rokeu
SP5	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, dan evaluasi kinerja industri													
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3						Rocana
SP6	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi													
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	70	71	73	76	80						Ro OSDM
SP7	Tersedianya data dan informasi industri yang berkualitas													
	1	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala (1-4)	3	3,1	3,12	3,15	3,18						Pusdatin

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88						Pusdatin
Biro Perencanaan								10,27	8,44	11,90	20,07	20,07	
SK1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Industri												
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3						Rocana
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8						Rocana
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Perencanaan	Persen	-	75	80	85	90						Rocana
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia								9,79	9,80	8,82	14,86	14,86	
SK1	Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi												
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Nilai	70	71	73	76	78						Ro OSDM
2	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	76	78	80	82	84						Ro OSDM
3	Nilai Evaluasi Tata Laksana	Nilai	65	70	75	80	85						Ro OSDM
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro OSDM	Persen	-	75	80	85	90						Ro OSDM
Biro Keuangan								48,63	48,70	57,05	96,18	96,18	
SK1	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan dan BMN												
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8						Rokeu
2	Nilai kinerja IKPA Kementerian Perindustrian	Nilai	88	88,5	89	89,5	90						Rokeu
3	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Rokeu
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Keuangan	Persen	-	75	80	85	90						Rokeu

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Biro Hukum								5,55	4,82	6,16	10,38	10,38		
SK1	Meningkatnya Layanan Legislasi dan Advokasi yang Andal													
	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80						Biro Hukum
	2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	-	60	65	70	75						Biro Hukum
	3	Persentase kesesuaian jumlah perkara hukum yang ditangani dengan yang dimohonkan	Persen	-	95	96	96	97						Biro Hukum
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Hukum	Persen	-	75	80	85	90						Biro Hukum
Biro Humas								13,80	12,13	12,05	20,31	20,31		
SK1	Meningkatnya Pemberitaan Media Massa dan Interaksi Media Sosial Terhadap Kinerja Industri													
	1	Tingkat Interaksi (<i>Engagement Rate</i>) akun media sosial Kemenperin dengan masyarakat	persen	2	3,2	3,4	3,6	3,8						Rohumas
	2	Persentase pemberitaan positif sektor industri di media massa	Persen	NA	98,5	98,7	98,9	99,1						Rohumas
	3	Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin	Nilai	80	81	82	83	84						Rohumas
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Humas	Persen	-	75	80	85	90						Rohumas
Biro Umum								46,93	71,65	59,64	100,55	100,55		
SK1	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Memadai													
	1	Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana	Indeks	3	3,2	3,5	3,8	4						Romum
	2	Efisiensi energi gedung kantor pusat Kementerian Perindustrian	Persen	41	42	43	44	45						Romum
SK2	Mewujudkan Layanan Administrasi yang Modern, Efisien, dan Akuntabel													
	1	Indeks audit kearsipan	Nilai	BB	BB	BB	BB	A						Romum

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Umum	Persen	-	75	80	85	90						Romum
Pusat Data dan Informasi									17,65	48,13	41,11	69,31	69,31	
SK1	Tersedianya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas													
	1	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala (1-4)	3,0	3,10	3,12	3,15	3,18						Pusdatin
	2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88						Pusdatin
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusdatin	Persen	-	75	80	85	90						Pusdatin
Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									21,47	127,29	35,04	59,07	59,07	
SK1	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	NA	75	80	85	90						P3DN
	2	Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	Persen	0	40	45	50	55						P3DN
SK2	Meningkatnya Nilai TKDN Produk Industri													
	1	Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)						P3DN
	2	Jumlah sertifikasi TKDN	Sertifikat	1.000	2.000	2.300	2.500	2.700						P3DN
Pusat Pemberdayaan Industri Halal									0	4,55	19,00	32,03	32,03	
SK1	Meningkatnya Industri Halal Dalam Negeri													
	1	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5						PPIH
	2	Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	Persen	NA	25	50	75	100						PPIH
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Perencanaan	Persen	-	75	80	85	90						PPIH

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Inspektur Jenderal								30	35	41	78	78	
SP1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian												
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1					Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2					Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100					Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93					Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik												
	1	Nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74					Set Itjen
	2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4					Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4
SP3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Jenderal	Persen	-	75	80	85	90					Semua Unit Eselon II di Itjen
Inspektorat I								1,7	1,88	2,11	4,04	4,04	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I												
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1					Ir 1
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	Persen	10	8	6	4	2					Ir 1
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	80	85	90	95	100					Ir 1
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	91	91,5	92	92,5	93					Ir 1
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang Baik												
	1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0					Ir 1

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I		Persen	-	75	80	85	90						Ir 1
Inspektorat II									0,96	1,78	2,05	3,93	3,93	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II													
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II		Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0						Ir 2
2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II		Persen	10	8	6	4	2						Ir 2
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II		Persen	80	85	90	95	100						Ir 2
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II		Persen	91	91,5	92	92,5	93						Ir 2
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang Baik													
1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat II		Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0						Ir 2
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ir 2		Persen	-	75	80	85	90						Ir 2
Inspektorat III									1,3	1,78	2,05	3,93	3,93	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III													
1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III		Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0						Ir 3
2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III		Persen	10	8	6	4	2						Ir 3
3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III		Persen	80	85	90	95	100						Ir 3
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III		Persen	91	91,5	92	92,5	93						Ir 3

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III yang Baik												
	1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat III	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0						lr 3
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lr 3	Persen	-	75	80	85	90						lr 3
Inspektorat IV								0,9	1,78	2,05	3,93	3,93	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0						lr 4
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	10	8	6	4	2						lr 4
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	80	85	90	95	100						lr 4
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	91	91,5	92	92,5	93						lr 4
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV yang Baik												
	1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat IV	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0						lr 4
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lr 4	Persen	-	75	80	85	90						lr 4
Sekretariat Inspektorat Jenderal								25,26	27,57	32,38	62,02	62,02	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1						Set Itjen
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2						Set Itjen
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100						Set Itjen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan)	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Set Itjen
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja yang Baik												
1	Nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74						Set Itjen
2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0						Set Itjen
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	-	75	80	85	90						Set Itjen
SS4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif												
1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80						Set Itjen
Direktorat Jenderal Industri Agro								54	74	111	193	193	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Agro Dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri agro	Persen	0,44	3,32	5,42	7,98	9,39						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
2	Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional	Persen	9,21	9,42	9,57	9,91	10,35						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro												
1	Utilisasi Sektor Industri Agro	Persen	-	58,14	61,21	66,82	74,89						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
2	Nilai investasi sektor industri Agro	Rp. Triliun	71,72	75,81	98,25	163,62	198,46						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> Sektor Industri Agro												
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0	Perusahaan	11	13	15	18	21						IMHLP, dan Mintemgar
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	1,95	1,96	1,97	2,01	2,05						IHHP
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Agro												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon II

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Substitusi Impor Produk Industri Agro	Persen	14	22	35	35	35						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri agro	Persen	54,75	58,54	59,71	60,91	62,12						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
SP4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro													
1	Nilai ekspor produk industri Agro	US\$ Miliar	48,60	51,79	56,14	62,61	72,59						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
2	Pertumbuhan ekspor produk industri Agro	Persen	0,28	6,58	8,39	11,53	15,94						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
3	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	Persen	30,97	31,88	32,11	32,62	33,58						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
4	Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	Persen	5,95	5,77	5,61	5,44	5,27						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
5	Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor	Persen	-	5	-	-	-						Ses Ditjen IA
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan								4,82	9,34	25,91	45,14	45,14	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	-1,23	1,02	3,19	5,07	5,45						IHHP
2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	Persen	1,40	1,41	1,42	1,45	1,48						IHHP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
1	Utilisasi Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Persen	-	51,69	55,25	62,91	74,49						IHHP
2	Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan	Rp Trilyun	20,92	21,52	23,97	32,88	37,16						IHHP
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi	Persen	1,95	1,96	1,97	2,01	2,05						IHHP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Persen	-	75	80	85	90						IHHP
	2	Substitusi Impor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Persen	14	22	35	35	35						IHHP
	3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	51,48	52,51	53,56	54,63	55,73						IHHP
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1	Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	22,60	24,40	26,42	29,14	32,97						IHHP
	2	Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	7,12	7,98	8,26	10,31	13,15						IHHP
	3	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	Persen	13,61	14,70	14,79	14,89	15,40						IHHP
	4	Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	2,12	2,03	1,93	1,84	1,75						IHHP
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan									6,55	12,76	20,72	36,10	36,10	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persen	1,78	4,00	6,13	8,91	10,57						IMHLP
	2	Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB nasional	Persen	6,49	6,74	6,92	7,25	7,67						IMHLP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan													
	1	Utilisasi Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Persen	-	67,01	68,29	73,29	80,73						IMHLP
	2	Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Rp Trilyun	46,79	49,55	67,87	119,91	148,52						IMHLP
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan													
	1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Perusahaan	5	6	7	8	10						IMHLP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Persen	-	75	80	85	90						IMHLP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Substitusi Impor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Persen	14	22	35	35	35						IMHLP
3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	Persen	-	58,91	60,08	61,29	62,51						IMHLP
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan													
1	Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	Persen	22,80	23,96	25,98	29,28	34,72						IMHLP
2	Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persen	-5,06	5,09	8,39	12,71	18,59						IMHLP
3	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total ekspor	Persen	13,36	15,47	15,85	16,53	16,63						IMHLP
4	Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	3,42	3,35	3,28	3,20	3,12						IMHLP
Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar								6,25	13,49	25,52	44,46	44,46	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persen	-5,05	2,32	4,02	5,98	6,96						Mintemgar
2	Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	Persen	1,22	1,23	1,24	1,25	1,27						Mintemgar
SK1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
1	Utilisasi Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Persen	-	66,61	69,59	71,40	72,78						Mintemgar
2	Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Rp Trilyun	4,01	4,74	6,40	10,84	12,78						Mintemgar
SK2 Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) $\geq$ 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Perusahaan	6	7	8	10	11						Mintemgar
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Persen	-	75	80	85	90						Mintemgar
2	Substitusi Impor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Persen	14	22	35	35	35						Mintemgar

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Persen	-	81,75	83,38	85,05	86,75						Mintemgar
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar												
	1 Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Persen	3,19	3,43	3,75	4,19	4,90						Mintemgar
	2 Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persen	-4,46	7,34	9,32	11,94	16,76						Mintemgar
	3 Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total ekspor	Persen	1,91	1,94	1,98	2,03	2,06						Mintemgar
	4 Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38						Mintemgar
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro								36,47	38,46	38,76	67,53	67,53	
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro												
	1 Tingkat kepuasan stakeholder atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	81	82	83	84	85						Set Ditjen IA
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro												
	1 Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi	Persen	71	72	73	74	75						Set Ditjen IA
	2 Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	%	-	90	91	92	93						Ses Ditjen IA
SK2	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro												
	1 Persentase perusahaan yang melakukan tindakan lanjut peningkatan ekspor	Persen	-	5	-	-	-						Set Ditjen IA
SK3	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	70	71	73	76	80						Set Ditjen IA
SK4	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima												
	1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	80	80,5	81	81,5	82						Ses Ditjen IA
	2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	76	77	78	79	80						Ses Ditjen IA
	3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro	Level	3	3	3	4	4						Ses Ditjen IA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro	%	71	-	-	-	-						Ses Ditjen IA
	Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap	%	-	27,5	30	32,5	35						
5	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	76	77	78	79	80						Ses Ditjen IA
6	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	%	81	82	83	84	85						Ses Ditjen IA
7	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	%	-	91,5	92	92,5	93						Ses Ditjen IA
8	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan	%	-	-	50	60	70						Ses Ditjen IA
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika								64	274	186	222	222	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	-9,15	3,50	4,92	6,88	7,14						IPAMP, IMATAP, IET, IL
2	Kontribusi PDB Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	4,07	3,93	3,90	3,93	3,95						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika												
1	Nilai investasi sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Rp. Triliun	121,43	114,59	142,25	214,46	229,56						IPAMP, IMATAP, IET, IL
2	Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	-	52,5	57,62	67,43	78,97						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industri 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) $\geq$ 3.0 di sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Perusahaan	8	10	14	16	18						IPAMP, IMATAP, IET
2	Kontribusi ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika berteknologi tinggi	Persen	5,87	5,72	5,87	5,98	6,11						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	48,56	49,53	50,52	51,53	52,57						IPAMP, IMATAP, IET, IL

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal ILMATE	Persen	-	21,76	77	80	85						SetDitjen ILMATE, IPAMP, IMATAP, IET, IL
	3 Substitusi Impor Produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	14	22	35	35	35						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Nilai ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	US\$ Miliar	37,05	39,82	43,01	46,81	51,53						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	2 Pertumbuhan ekspor sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	0,46	7,50	8,01	8,83	10,08						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	3 Kontribusi ekspor produk sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	23,61	22,21	22,30	22,15	21,71						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	4 Rasio impor bahan baku industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	11,60	11,17	10,76	10,38	9,99						IPAMP, IMATAP, IET, IL
Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan								7	8,33	22,50	26,88	26,88	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-19,86	4,02	5,44	7,30	7,77						IMATAP
	2 Kontribusi PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB nasional	Persen	1,35	1,27	1,26	1,27	1,27						IMATAP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
	1 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Rp. Triliun	16,12	12,35	16,43	25,94	27,21						IMATAP
	2 Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-	44,73	49,67	60,97	78,95						IMATAP
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Perusahaan	6	7	8	9	10						IMATAP
	2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan berteknologi tinggi	Persen	2,35	2,24	2,30	2,34	2,39						IMATAP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat IMATAP	Persen	-	75	77	80	85						IMATAP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Substitusi Impor sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	14	22	35	35	35						IMATAP
3	TKDN industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan (rerata tertimbang)	Persen	60,51	61,71	62,95	64,20	65,49						IMATAP
SK4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan													
1	Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	US\$ Miliar	9,32	10,09	11,01	12,12	13,76						IMATAP
2	Pertumbuhan ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-9,30	8,21	9,14	10,11	13,48						IMATAP
3	Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor	Persen	5,94	5,63	5,71	5,74	5,80						IMATAP
4	Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07						IMATAP
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika								6,96	112,09	33,00	39,42	39,42	
TJ Meningkatnya Peran Industri Elektronika dan Telematika dalam Perekonomian Nasional													
1	Pertumbuhan PDB industri elektronika dan telematika	Persen	-3,75	1,21	4,59	6,57	6,75						IET
2	Kontribusi PDB industri elektronika dan telematika terhadap PDB nasional	Persen	0,44	0,42	0,42	0,42	0,43						IET
SK1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Elektronika dan Telematika													
1	Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Rp. Triliun	3,35	2,80	3,74	5,48	7,65						IET
2	Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-	55,47	58,55	65,61	75,75						IET
SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Elektronika dan Telematika													
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika	Perusahaan	2	2	4	4	5						IET
2	Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi	Persen	3,33	3,30	3,38	3,44	3,52						IET
SK3 Meningkatnya Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat IET	Persen	-	8,59	77	80	85						IET
2	Substitusi Impor sektor Industri elektronika dan telematika	Persen	14	22	35	35	35						IET
3	TKDN industri elektronika dan telematika (rerata tertimbang)	Persen	32,14	32,78	33,44	34,10	34,79						IET

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Elektronika dan Telematika												
1	Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika	US\$ Miliar	8,19	8,70	9,27	9,93	10,67						IET
2	Pertumbuhan ekspor produk industri elektronika dan telematika	Persen	6,12	6,31	6,51	7,16	7,37						IET
3	Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor	Persen	5,22	4,85	4,81	4,70	4,49						IET
4	Rasio impor bahan baku industri elektronika dan telematika terhadap PDB sektor industri elektronika dan telematika	Persen	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05						IET
Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian								7,00	41,05	69,50	83,02	83,02	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	-7,59	3,96	5,09	7,22	7,53						IPAMP
2	Kontribusi PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB nasional	Persen	0,76	0,72	0,72	0,72	0,72						IPAMP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian												
1	Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian	Rp. Triliun	7,14	7,16	9,07	13,31	13,07						IPAMP
2	Peningkatan utilisasi sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	-	52,6	58,4	66,43	76,47						IPAMP
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian												
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri alat kesehatan	Perusahaan	-	1	2	3	3						IPAMP
2	Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi	Persen	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20						IPAMP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat IPAMP	Persen	-	17,6	77	80	85						IPAMP
2	Substitusi Impor sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	14	22	35	35	35						IPAMP
3	TKDN industri permesinan dan alat mesin pertanian (rerata tertimbang)	Persen	42,81	43,66	44,54	45,43	46,34						IPAMP
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian												
1	Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian	US\$ Miliar	3,99	4,45	5,00	5,68	6,56						IPAMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Pertumbuhan ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	-6,94	14,02	10,73	12,56	15,64						IPAMP
3	Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor	Persen	2,54	2,54	2,61	2,68	2,76						IPAMP
4	Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96						IPAMP
Direktorat Industri Logam								7,80	67,91	17,50	20,90	20,90	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Logam dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri logam	Persen	-0,40	3,54	4,52	6,48	6,57						IL
2	Kontribusi PDB industri logam terhadap PDB nasional	Persen	1,51	1,51	1,51	1,52	1,53						IL
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam												
1	Nilai realisasi investasi industri logam	Rp. Triliun	94,81	92,29	113,01	169,73	181,62						IL
2	Peningkatan utilisasi sektor Industri Logam		-	65,72	71,37	81,42	82,97						IL
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri Logam												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Logam	Persen	-	6,93	77	80	85						IL
2	Substitusi Impor sektor Industri logam	Persen	14	22	35	35	35						IL
3	TKDN industri logam (rerata tertimbang)	Persen	61,34	62,56	63,82	65,09	66,40						IL
SK3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam												
1	Nilai ekspor produk industri logam	US\$ Miliar	15,54	16,58	17,73	19,07	20,55						IL
2	Pertumbuhan ekspor produk industri logam	Persen	6,53	6,71	6,90	7,56	7,75						IL
3	Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor	Persen	9,90	9,25	9,19	9,02	8,65						IL
4	Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri logam	Persen	10,54	10,11	9,70	9,31	8,91						IL
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika								34,93	44,44	43,56	52,04	52,04	
Tj	Terwujudnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Yang Efektif												
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	78	78,5	79	79,5	80						Set ILMATE

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Set Ditjen ILMATE													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	-	75	77	80	85						Ses ILMATE
SK2	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Nilai	78	78,5	79	79,5	80						Set ILMATE
	2	Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	85	90	90,5	91	91,5						Set ILMATE
	3	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	78	78	79	79	80						Set ILMATE
SK3	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95	96	96	96	96						Set ILMATE
	2	Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	89	89,5	90	90,5	91						Set ILMATE
	3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4						Set ILMATE
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	18,90	44,12	70	71	72						Set ILMATE
SK4	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Berkualitas													
	1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18						Set ILMATE
SK5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif													
	1	Efektifitas Regulasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif	Persen	-	72	74	76	78						Set ILMATE
SK6	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Profesional dan Berkepribadian													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Indeks	70	71	73	76	80						Set ILMATE

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil								63	104	114	200	200		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam Perekonomian Nasional													
1	Pertumbuhan PDB industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	-1,49	4,21	5,77	7,48	7,61							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
2	Kontribusi industri kimia, farmasi, dan tekstil terhadap PDB	Persen	4,48	4,34	4,36	4,44	4,49							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
1	Nilai investasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Rp. Triliun	61,97	67,10	93,29	157,44	175,50							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
2	Peningkatan utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	67,99	63,21	64,17	68,83	76,07							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Perusahaan	11	13	15	18	21							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
2	Kontribusi ekspor produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berteknologi tinggi	Persen	4,85	5,08	5,20	5,30	5,42							IKHu, IKHF
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Negeri													
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	35,79	36,51	37,24	37,98	38,74							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	-	75	80	85	90							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK, Setditjen IKFT
3	Substitusi Impor Produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	14	22	35	35	35							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
1	Pertumbuhan ekspor produk industri kimia, farmasi dan tekstil	Persen	-6,90	6,98	8,74	10,87	13,06							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
2	Kontribusi ekspor produk industri kimia, farmasi dan tekstil terhadap total ekspor	Persen	18,9	18,0	18,2	18,4	18,5							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Rasio impor bahan baku industri Kimia, Farmasi dan Tekstil terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	18,84	18,45	18,14	17,85	17,59						IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
4	Nilai ekspor produk industri kimia, farmasi, dan tekstil	US\$ Miliar	30,12	32,23	35,05	38,85	43,93						IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki								9,32	16,23	26,80	46,83	46,83	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Persen	-8,86	2,92	4,81	6,60	6,75						ITKAK
2	Kontribusi PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB nasional	Persen	1,46	1,42	1,42	1,43	1,43						ITKAK
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki												
1	Nilai investasi sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Rp. Triliun	9,61	9,19	12,10	18,64	22,07						ITKAK
2	Peningkatan utilisasi sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Persen	65,98	59,90	60,75	66,76	76,54						ITKAK
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki												
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) $\geq$ 3.0 di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Perusahaan	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00						ITKAK
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki Dalam Negeri												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Persen	62,1	63,4	64,6	65,9	67,2						ITKAK
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	Persen	-	75	80	85	90						ITKAK
3	Substitusi Impor Produk Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	Persen	14	22	35	35	35						ITKAK
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki												
1	Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki	Persen	-8,40	7,11	9,10	11,77	13,99						ITKAK
2	Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total ekspor	Persen	10,54	9,88	10,02	10,22	10,38						ITKAK
3	Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	3,96	3,89	3,84	3,79	3,75						ITKAK
4	Nilai ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki	US\$ Miliar	16,54	17,72	19,33	21,61	24,63						ITKAK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi								7,23	9,88	18,47	32,27	32,27		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kimia Hilir dan Farmasi dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri kimia hilir dan farmasi	Persen	1,66	5,02	6,19	7,73	7,87						IKHF
	2	Kontribusi PDB industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB nasional	Persen	1,13	1,14	1,16	1,19	1,22						IKHF
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Nilai investasi sektor industri kimia hilir dan farmasi	Rp. Triliun	12,30	14,15	18,59	33,96	40,00						IKHF
	2	Peningkatan utilisasi sektor industri kimia hilir dan farmasi	Persen	72,27	62,68	60,79	66,10	76,15						IKHF
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi	Perusahaan	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00						IKHF
	2	Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi berteknologi tinggi	Persen	1,54	1,64	1,68	1,71	1,75						IKHF
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Dalam Negeri													
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri kimia hilir dan farmasi	Persen	53	54	55,1	56,2	57,4						IKHF
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Persen	-	75	80	85	90						ITKAK
	3	Substitusi Impor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Persen	14	22	35	35	35						ITKAK
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hilir dan Farmasi													
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi	Persen	1,06	8,38	10,35	12,21	14,81						IKHF
	2	Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi terhadap total ekspor	Persen	4,18	3,97	4,07	4,17	4,26						IKHF
	3	Rasio impor bahan baku industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	1,92	1,90	1,90	1,90	1,90						IKHF
	4	Nilai ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi	US\$ Miliar	6,56	7,11	7,85	8,81	10,11						IKHF
Direktorat Industri Kimia Hulu								10,08	30,81	13,50	23,59	23,59		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kimia Hulu dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri kimia hulu	Persen	9,29	5,36	6,60	8,35	8,46						IKHu

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Kontribusi PDB industri kimia hulu terhadap PDB nasional	Persen	1,33	1,26	1,27	1,30	1,32						IKHu
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hulu												
	1 Nilai investasi sektor industri kimia hulu	Rp. Triliun	30,62	31,69	45,92	75,53	80,15						IKHu
	2 Peningkatan utilisasi sektor industri kimia hulu	Persen	71,83	70,59	73,45	76,36	79,34						IKHu
SK 2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di sektor Industri Kimia Hulu												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) $\geq$ 3.0 di sektor industri kimia hulu	Perusahaan	3,00	3,00	4,00	4,00	5,00						IKHu
	2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu berteknologi tinggi	Persen	3,29	3,42	3,50	3,57	3,65						IKHu
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hulu Dalam Negeri												
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri kimia hulu	Persen	39,90	40,70	41,50	42,40	43,20						IKHu
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Kimia Hulu	Persen	-	75	80	85	90						IKHu
	3 Substitusi Impor Produk Industri Kimia Hulu	Persen	14	22	35	35	35						IKHu
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hulu												
	1 Pertumbuhan ekspor produk Industri kimia hulu	Persen	-4,58	5,19	6,05	6,92	8,36						IKHu
	2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu terhadap total ekspor	Persen	3,89	3,58	3,53	3,44	3,32						IKHu
	3 Rasio impor bahan baku Industri Kimia Hulu terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	12,12	11,81	11,54	11,30	11,06						IKHu
	4 Nilai ekspor produk industri kimia hulu	US\$ Miliar	6,10	6,42	6,81	7,28	7,89						IKHu
Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam								4,82	5,08	11,60	20,27	20,27	
TJ	Meningkatnya peran Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam dalam perekonomian nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	-9,13	3,26	5,42	7,25	7,30						ISKPBGNL
	2 Kontribusi PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB nasional	Persen	0,56	0,53	0,52	0,52	0,52						ISKPBGNL

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
1	Nilai investasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Rp. Triliun	9,44	12,08	16,69	29,30	33,27						ISKPBGNL
2	Peningkatan utilisasi sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	63,25	61,87	64,14	67,87	72,56						ISKPBGNL
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
1	Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Perusahaan	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00						ISKPBGNL
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Dalam Negeri												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	37,90	38,70	39,40	40,20	41,00						ISKPBGNL
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Persen	-	75	80	85	90						ISKPBGNL
3	Substitusi Impor Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Persen	14	22	35	35	35						ISKPBGNL
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
1	Pertumbuhan ekspor produk industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	-6,90	6,40	8,05	9,70	12,03						ISKPBGNL
2	Kontribusi ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total ekspor	Persen	0,58	0,54	0,55	0,55	0,55						ISKPBGNL
3	Rasio impor bahan baku industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,84	0,85	0,86	0,87	0,89						ISKPBGNL
4	Nilai ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	US\$ Miliar	0,92	0,98	1,06	1,16	1,30						ISKPBGNL
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil								31,34	41,95	43,87	76,66	76,66	
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil												
1	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						Setditjen IKFT
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Set Ditjen IKFT												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	-	75	80	85	90						Setditjen IKFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian													
	1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	70,00	71,00	73,00	76,00	80,00						Setditjen IKFT
SK3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1	Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00						Setditjen IKFT
	2	Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00						Setditjen IKFT
	3	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00						Setditjen IKFT
	4	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00						Setditjen IKFT
SK4	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00						Setditjen IKFT
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78,00	78,20	78,40	78,60	78,80						Setditjen IKFT
SK5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
	1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18						Setditjen IKFT
SK6	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif													
	1	Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	-	72	74	76	78						Setditjen IKFT
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka									325	236	416	558	558	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Kecil Menengah dan Aneka dalam Perekonomian Nasional													
	1	Pertumbuhan PDB industri Aneka	Persen	-2,04	0,31	1,76	3,26	4,30						IAKSK
	2	Kontribusi PDB industri Aneka	Persen	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11						IAKSK
	3	Laju Pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah	Persen	5,7	5,9	6,2	6,6	6,9						PFBB, IAKSK dan LMEA
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kecil Menengah dan Aneka													
	1	Utilisasi Sektor Industri Aneka	Persen	NA	64,53	66,09	71,89	80,60						IAKSK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Nilai investasi sektor industri Aneka	Rp. Triliun	4,15	4,79	6,11	9,07	10,32						IAKSK
SP 2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor IKMA													
1	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						PFBB, IAKSK, dan LMEA
2	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	IKM (Kumulatif)	20	60	100	160	260						PFBB, IAKSK, LMEA dan BPIPI
3	Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi	Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11						IAKSK
SP3 Meningkatkan Kemampuan Industri Aneka Dalam Negeri													
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang)	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81						IAKSK
2	Substitusi Impor	Persen	14	22	35	35	35						IAKSK
3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ditjen IKMA	Persen	-	75	80	85	90						IAKSK
SP 4 Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri aneka													
1	Pertumbuhan ekspor industri aneka	Persen	3,47	4,51	5,93	7,07	7,97						IAKSK
2	Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor	Persen	4,74	4,65	4,55	4,42	4,29						IAKSK
3	Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32						IAKSK
4	Nilai ekspor produk industri aneka	US\$ Miliar	10,38	10,36	11,30	12,36	13,54						IAKSK
SP5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah													
1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20						PFBB, IAKSK, LMEA, Setditjen IKMA
2	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000						PFBB, IAKSK, LMEA, Setditjen IKMA melalui Dekon
3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	40	80	120	160	200						PFBB, IAKSK dan LMEA
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5						Setditjen IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP6	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah													
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44						Set Ditjen IKMA
	2	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang direvitalisasi	Sentra IKM	107	107	107	113	113						PFBB, IAKSK, LMEA
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan									59,35	32,64	90,12	120,77	120,77	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
	1	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Persen	7,2	7,5	7,7	7,9	8,2						PFBB
SK1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kecil dan Menengah Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan													
	1	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	IKM	500	500	500	500	500						PFBB
	2	Tumbuh dan berkembangnya start up IKM PFBB berbasis teknologi	IKM (Kumulatif)	15	30	45	60	85						PFBB
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit PFBB	Persen	-	75	80	85	90						PFBB
SK3	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan													
	1	Proporsi nilai tambah IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20,00						PFBB
	2	Wirausaha baru industri kecil Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000						PFBB
	3	IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	5	15	30	45	60						PFBB
SK4	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
	1	Jumlah sentra industri kecil dan menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang direvitalisasi	Sentra IKM	37	37	37	39	39						PFBB
SK5	Berkembangnya Ekosistem Bisnis yang Kondusif dan Mendukung Pemberdayaan IKM													
	1	Peningkatan daya saing produk IKM melalui perbaikan desain kemasan dan fasilitasi HKI	IKM	100	150	150	200	200						PFBB

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan								60,24	38,64	92,09	123,41	123,41	
TJ	Meningkatnya Peran Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan												
1	Pertumbuhan PDB industri aneka	Persen	-2,04	0,31	1,76	3,26	4,30						IAKSK
2	Kontribusi industri aneka terhadap PDB	Persen	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11						IAKSK
3	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan	Persen	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2						IAKSK
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian IAKSK												
1	Utilisasi Sektor Industri Aneka	Persen	NA	64,53	66,09	71,89	80,60						IAKSK
2	Nilai investasi sektor industri aneka	Rp. Triliun	4,15	4,79	6,11	9,07	10,32						IAKSK
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor IAKSK												
1	Menguatnya Sektor Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Industri dan Aneka Melalui Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	IKM	500	500	500	500	500						IAKSK
2	Tumbuh dan berkembangnya start up IKM berbasis teknologi	IKM (Kumulatif)	15	30	45	60	85						IAKSK
3	Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi	Persen	0,11	0,06	0,06	0,07	0,07						IAKSK
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Dalam Negeri												
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang)	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81						IAKSK
2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit IAKSK	Persen	NA	75	80	85	90						IAKSK
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Aneka												
1	Pertumbuhan ekspor industri aneka	Persen	3,47	4,51	5,93	7,07	7,97						IAKSK
2	Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor	Persen	4,74	4,65	4,55	4,42	4,29						IAKSK
3	Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30						IAKSK
4	Nilai ekspor produk industri aneka	US\$ Miliar	10,38	10,36	11,30	12,36	13,54						IAKSK
SK5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan												
1	Proporsi nilai tambah IKM kimia, sandang, dan kerajinan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20						IAKSK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Wirausaha baru industri kecil kimia, sandang, dan kerajinan yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000						IAKSK
3	IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	10	20	30	40	50						IAKSK
SK6	Meningkatnya Persebaran Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan												
1	Jumlah sentra IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang direvitalisasi	Sentra IKM	35	35	37	37	37						IAKSK
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut								59,42	30,54	85,13	114,09	114,09	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut												
1	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut	Persen	3,9	4,5	4,8	5,3	5,7						LMEA
SK1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut												
1	Tumbuhnya <i>startup</i> IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut berbasis teknologi	IKM	20	40	60	80	100						LMEA
2	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	500	500	500	500	500						LMEA
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan jasa melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Dit LMEA												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit LMEA	Persen	NA	75,00	80,00	85,00	90,00						LMEA
SK3	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut												
1	Proporsi nilai tambah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20						LMEA
2	Wirausaha baru industri kecil logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000						LMEA
3	IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	20	30	40	60	80						LMEA
SK4	Meningkatnya Persebaran Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut												
1	Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang direvitalisasi	Sentra IKM	22	24	26	29	32						LMEA
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka								124,68	122,03	116,27	155,82	155,82	
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka												
1	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						Set Ditjen IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kecil Menengah, dan Aneka													
	1	Terbentuknya <i>platform</i> pusat bantuan IKM (<i>service center</i>)	Unit	1	1	1	1	1					Set Ditjen IKMA	
SK2	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1	Jumlah Wirausaha yang tumbuh	WUB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					Set Ditjen IKMA	
SK3	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang profesional dan berkepribadian													
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen IKMA	Nilai	70	71	73	76	80					Set Ditjen IKMA	
SK4	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1	Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90	90,5	91	91,5	92					Set Ditjen IKMA	
	2	Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	83	84	85	86	87					Set Ditjen IKMA	
	3	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	3,26	3,265	3,27	3,275	3,28					Set Ditjen IKMA	
	4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Persen	76	77	78	79	80					Set Ditjen IKMA	
	5	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	76	77	78	79	80					Set Ditjen IKMA	
SK5	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95	96	96	96	96					Set Ditjen IKMA	
	2	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	77	78	79	80	81					Set Ditjen IKMA	
SK6	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah													
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM (Kumulatif)	17	23	29	38	44					Set Ditjen IKMA	
SK7	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Set Ditjen IKMA													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Set Ditjen IKMA	Persen	-	75	80	85	90					Set Ditjen IKMA	
SK8	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Aneka dan Industri Kecil Menengah													
	1	Efektifitas Regulasi Industri Aneka dan Industri Kecil Menengah	Persen	-	72	74	76	78					Set Ditjen IKMA	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia								20,91	12,35	32,81	43,97	43,97		
TJ	Pertumbuhan industri Kulit, Barang Jadi Kulit dan Alas Kaki terhadap Industri Aneka													
	1	Pertumbuhan industri Kulit, Barang Jadi Kulit dan Alas Kaki terhadap Industri Aneka	Persen	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60						BPIPI
SK1	Meningkatnya daya saing kemandirian alas kaki dan produk kulit													
	1	Meningkatnya nilai produksi IKM yang dibina BPIPI	Persen	0,70	2,00	1,50	2,00	2,50						BPIPI
	2	Meningkatnya nilai penjualan yang dibina oleh BPIPI	Persen	0,70	3,00	1,50	2,00	2,50						BPIPI
	3	IKM Kulit, Barang Jadi Kulit dan Alas Kaki yang mendapatkan ijin usaha	IKM	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						BPIPI
SK2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di sektor industri alas kaki dan produk kulit													
	1	Nilai INDI 4.0 IKM alas kaki atau produk kulit	Nilai	1,00	1,20	1,80	1,90	2,00						BPIPI
	2	Tumbuhnya IKM start-up Berbasis Teknologi	IKM	3,00	4,00	5,00	7,00	10,00						BPIPI
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan jasa melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada BPIPI													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPIPI	Persen	NA	75,00	80,00	85,00	90,00						BPIPI
Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional								101	163	97	175	176		
SP 1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
	1	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32						All
	2	Kemitraan industri dalam jaringan produksi global	Persen	13	15	20	25	30 (kumulatif)						ASDIPI
SP 2	Meningkatnya Persebaran Industri													
	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)						PI
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)						PI
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)						PI
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1						PI
SP3	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal	Rp. Triliun	140	246	258	272	288 (kumulatif)						KIUI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	US\$ miliar	13	13,1	13,2	13,3	13,4						ASDIPI
SP4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal KPAIL	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon II di Ditjen KPAIL
SP5	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif												
	1 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Peraturan	1	2	3	4	5 (kumulatif)						Setditjen
SP6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien												
	1 Nilai SAKIP Ditjen KPAIL	Nilai	80	81	82	83	85						Setditjen
Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri								3,11	2,98	8,75	15,89	15,89	
SK1	Fasilitasi dan Pendampingan Industri												
	1 Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal	Rp Triliun	140	246	258	272	288 (kumulatif)						KIUI
	2 Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	IDN	12	12	13	14	15						KIUI
SK2	Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal												
	1 Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri	Rekomendasi	9	10	10	11	12						KIUI
	2 Rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor	Rekomendasi	-	1	2	2	2						KIUI
	3 Rekomendasi Kebijakan substitusi impor	Rekomendasi	-	1	2	3	4						KIUI
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Persen	-	75	80	85	90						KIUI
SK4	Sistem Informasi Ketahanan dan Iklim Usaha Industri												
	1 Sistem Informasi Pengawasan dan Ketahanan	Modul	-	1	2	2	2						KIUI
SK5	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif												
	1 Rancangan Peraturan Perundang-undangan	RPP/ RPerpres/ Rpermen	1	1	1	1	1						KIUI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK6	Akuntabilitas Manajemen Organisasi													
1	Nilai SAKIP Direktorat KIUI	Nilai	80	81	82	83	85						KIUI	
Direktorat Akses Sumber Daya Industri Internasional								49,01	50,18	14,10	25,60	25,60		
SK1	Pemasaran Global													
1	Kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	Kesepakatan	10	2	2	2	2						ASDIPI	
2	Industri yang difasilitasi kemitraan jaringan produksi global	Perusahaan	13	15	20	25	30 (kumulatif)						ASDIPI	
SK2	Investasi Perusahaan Multinasional													
1	Peningkatan peluang investasi sektor industri	LoI	3	3	4	5	5						ASDIPI	
2	Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan	US\$ miliar	13	13,1	13,2	13,3	13,4						ASDIPI	
SK3	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi													
1	Fasilitasi dan penjajagan kerjasama SDI dengan negara mitra	Negara mitra	2	4	4	5	5						ASDIPI	
2	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	SDI	-	2	3	4	4						ASDIPI	
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri Internasional	Persen	-	75	80	85	90						ASDIPI	
SK5	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi													
1	Rekomendasi kebijakan kerjasama dan investasi bidang industri	Rekomendasi	1	1	1	1	1						ASDIPI	
SK6	Akuntabilitas Manajemen Organisasi													
1	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	Nilai	80	81	82	83	85						ASDIPI	
Direktorat Akses Industri Internasional								2,51	5,44	12,95	23,52	23,52		
SK1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
1	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor	Persen	27	28	29	30	32						All	
2	Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Persen	30	35	40	45	50						All	
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Akses Industri Internasional	Persen	-	75	80	85	90						All	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular												
1	Kerjasama selatan-selatan dan triangular	Kerjasama	1	2	3	3	3						All
SK4	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi												
1	Rekomendasi inisiasi FTA/PTA	Rekomendasi	1	1	1	1	1						All
SK5	Akuntabilitas Manajemen Organisasi												
1	Nilai SAKIP Direktorat All	Nilai	80	81	82	83	85						All
Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri								3,8	11,8	13,4	24,2	24,24	
SK1	Penyebaran Industri di Luar Jawa												
1	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar pulau Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17						PI
2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33						PI
3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3						PI
4	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan	WPPI	3	3	3	3	3						PI
5	Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan	KPI	3	10	10	10	10						PI
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri	Persen	-	75	80	85	90						PI
SK3	Tersedianya NSPK Pengembangan Perwilayahan Industri												
1	Regulasi pengembangan perwilayahan industri	Kebijakan	2	2	2	2	2						PI
SK4	Akuntabilitas Manajemen Organisasi												
1	Nilai SAKIP Direktorat PI	Nilai	80	81	82	83	85						PI
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri serta pengembangan Akses Industri Internasional								42,08	92,85	47,50	86,26	86,26	
SK1	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri												
1	Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	Orang	180	180	180	180	180						Set Ditjen KPAII

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif												
1	Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Peraturan	1	2	3	4	5 (kumulatif)						Set Ditjen KPAII
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII	Persen	-	75	80	85	90						Setditjen KPAII
SK4	Fasilitasi Kesepakatan Internasional												
1	Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	Naskah kesepakatan	4	10	11	12	13						Set Ditjen KPAII
SK5	Publikasi Kebijakan												
1	Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	Media informasi dan promosi	2	2	2	2	2						Set Ditjen KPAII
SK6	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif												
1	Efektifitas Regulasi terkait Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Persen	-	72	74	76	78						Set Ditjen KPAII
SK7	Akuntabilitas Manajemen Organisasi												
1	Nilai SAKIP Setditjen KPAII	Nilai	80	81	82	83	85						Set Ditjen KPAII
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri								563	612	663	1.270	1.270	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						PIH
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>												
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan industri 4.0	Persen	NA	5	10	15	20						POPTIKJI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri												
1	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20						P4SI
2	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	NA	85	87	90	95						P2SI
3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75						POPTIKJI, Balai Besar, BPJI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	Persen	NA	72	75	78	80						Semua Unit di lingkungan BSKJI
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)						PIH
	2 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6						Balai Besar, BPJI, BSI
SP5	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien												
	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Sekretariat BSKJI, Balai Besar, BPJI, BSI
	2 Index penerapan manajemen risiko (MRI) BSKJI	Level	3	3	3	4	4						Sekretariat BSKJI, Balai Besar, BPJI, BSI
Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri								7,35	13,48	18,46	35,36	35,36	
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri												
	1 SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20						P4SI
	2 Peningkatan kompetensi pengujian/standarisasi di dalam negeri (Satker)	Ruang Lingkup	15	20	25	30	35 (akumulasi)						P4SI
	3 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P4SI	Persen	NA	40	42	44	45						P4SI
SK2	Tersedianya Regulasi yang Efektif												
	1 Efektifitas Regulasi standar industri yang Efektif	Persen	NA	72	74	76	78						P4SI
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri								3,69	7,36	10,00	19,15	19,15	
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri												
	1 Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	NA	85	87	90	95						P2SI
	2 Peningkatan cakupan jenis (produk) pengawasan SNI wajib	Persen	NA	5	20	30	50						P2SI
	3 Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI	Persen	NA	30	50	75	95						P2SI
	4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P2SI	Persen	NA	72	75	78	80						P2SI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri									4,35	11,58	22,90	43,85	43,85	
SK1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>													
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan industri 4.0	Persen	NA	5	10	15	20						POPTIKJI
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri													
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75						POPTIKJI
	2	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	Persen	NA	NA	70	75	80						POPTIKJI
	3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat OPTIKJI	Persen	NA	72	75	78	80						POPTIKJI
Pusat Industri Hijau									5,34	6,80	13,40	25,66	25,66	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						PIH
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)						PIH
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PIH	Persen	NA	72	75	78	80						PIH
Sekretariat BSKJI									40,88	55,81	64,06	122,67	122,67	
SK1	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Set BSKJI	Persen	NA	40	42	44	45						Set BSKJI
SK2	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja													
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81						Set BSKJI
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81						Set BSKJI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Memperkuat Sistem Informasi Terintegrasi, Kerjasama dan Layanan Publik													
	1	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	18	20	40	62	100						Set BSKJI
	2	Implementasi kerja sama	Persen	NA	60	63	67	70						Set BSKJI
	3	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	Indeks	NA	25	35	45	60						Set BSKJI
SK4	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi													
	1	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	Persen	41	41	41	45	45						Set BSKJI
	2	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	69	72	72	75	75						Set BSKJI
	3	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	50	52	60	64	72						Set BSKJI
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Set BSKJI
Balai Besar, BPJI & BSI									501,34	516,82	534,48	1.023,52	1.023,52	
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri													
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	10	12	14	15						Balai Besar, BPJI
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Daerah di lingkungan BSKJI	Persen	NA	40	42	44	45						Balai Besar, BPJI, BSI
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6						Balai Besar, BPJI, BSI
SK3	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi													
	1	Level minimal Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Satker	Level	3	3	3	4	4						Balai Besar, BPJI, BSI
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Balai Besar, BPJI, BSI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									735	1.167	982	1.881	1.881	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						Pusdiklat Industri
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta / orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						Pusdiklat Industri
4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000						Pusdiklat Industri
5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						PPVI
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>												
1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						Pusdiklat Industri
2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						PPVI
3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30	50	70	90	95						Pusdiklat industri dan PPVI
SP3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan												
1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10						Pusdiklat Industri
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20						Pusdiklat Industri
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320						Pusdiklat Industri
SP4	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian												
1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90						Pusbindiklat SDM Aparatur
2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Persen	0	70	75	80	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
SP5	Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri												
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12						PPVI
2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						PPVI
3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						PPVI
4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SP6	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSPDMI	Persen	-	50	60	70	80						Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSPDMI
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									41,52	137,96	64,25	123,03	123,03	
SK1	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80						Set. BPSPDMI
SK2	Terwujudnya Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSPDMI
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Persen	70	72	74	76	78						Set. BPSPDMI
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80						Set. BPSPDMI
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSPDMI	Persen	-	50	60	70	80						Set. BPSPDMI
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri									20,81	36,47	79,36	151,97	151,97	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						Pusdiklat Industri
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						Pusdiklat Industri
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta / orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						Pusdiklat Industri
	4	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	-	-	-	-						Pusdiklat Industri
	5	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang	3.580	4.900	20.000	20.000	20.000						Pusdiklat Industri
	6	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	810	480	5.000	18.000	19.000						Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>												
1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						Pusdiklat Industri
2	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	NA	NA	70%	90%	95%						Pusdiklat Industri
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri												
1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10						Pusdiklat Industri
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20						Pusdiklat Industri
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320						Pusdiklat Industri
Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri								94,49	210,31	108,80	208,34	208,34	
SK1	Meningkatnya Daya Saing SDM Industri												
1	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500						PPVI
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>												
1	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30%	50%	NA	NA	NA						PPVI
SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/ Industri	4	6	8	10	12						PPVI
2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						PPVI
3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						PPVI
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur								13,77	16,00	13,00	24,89	24,89	
SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten dan Profesional												
1	Presentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	Persen	-	82	85	87	90						Pusbindiklat SDM Aparatur
2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan JF	Persen	-	70	75	80	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Bidang Industri Melalui Pendidikan dan Pelatihan												
1	Persentase SDM yang kompeten melalui pelatihan	Persen		90	92	93	95						Pusbindiklat SDM Aparatur

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Akreditasi manajemen kelembagaan pelatihan	Predikat	-	B	B	B	BB						Pusbindiklat SDM Aparatur
3	Ketepatan waktu kelulusan peserta program pendidikan Formal	Persen	-	80	82	85	87						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK3 Meningkatkan Pembinaan Jabatan Fungsional													
1	Peningkatan penetapan angka kredit	Persen	-	75	80	82	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
2	Efektivitas Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional	Persen	-	75	80	82	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
BDI, SMK, Poltek dan Akom								564,41	766,14	716,60	1.372,28	1.372,28	
SK1 Meningkatkan daya saing Tenaga Kerja Industri													
1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	16.190	42.520	22.600	77.000	81.000						BDI
2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	23.820	23.920	24.070	24.320	23.920						SMK dan Poltek
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						SMK dan Poltek
SK2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/ Industri	4	6	11	13	15						SMK dan Poltek
2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						SMK dan Poltek
3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						SMK dan Poltek
4	Inkubator industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						BDI
SK3 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						SMK dan Poltek
SK4 Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80						BDI, SMK, dan Poltek

Tabel 2
Matriks Keterkaitan Kemenperin Tahun 20202024

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN									
Sasaran Strategis	SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
Indikator Kinerja SS	SS1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	BPSDMI	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Pusdiklat Industri	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Indikator Kinerja SS	SS1.2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	BPSDMI	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Pusdiklat Industri	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
Indikator Kinerja SS	SS1.3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	BPSDMI	Rp Juta / orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Pusdiklat Industri	Rp Juta / orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
Indikator Kinerja SS	SS1.4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA	Rp. Triliun	259,27	255,29	334,90	544,59	613,85
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.2	Nilai investasi sektor industri Agro	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Rp. Triliun	71,72	68,81	93,25	163,62	198,46
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.1	Nilai investasi sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IET, Dit IPAMP, dan Dit IL	Rp. Triliun	121,43	114,59	142,25	214,46	229,56
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.1	Nilai investasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Dit ITKAK, Dit IKHF, Dit IKHU, dan Dit ISKPBGNL	Rp. Triliun	61,97	67,10	93	157	176
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kecil Menengah dan Aneka	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.2	Nilai investasi sektor industri Aneka	Dit IAKSK	Rp. Triliun	4,15	4,79	6,11	9,07	10,32

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	SS1.5	Peningkatan Utilisasi Sektor Industri	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA	Persen	-	61,55	64,46	69,86	77,52
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.1	Utilisasi Sektor Industri Agro	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Persen	-	58,14	61,21	66,82	74,89
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.2	Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IET, Dit IPAMP, dan Dit IL	Persen	-	52,5	57,62	67,43	78,97
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.2	Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Dit ITKAK, Dit IKHF, Dit IKHU, dan Dit ISKPBGNL	Persen	-	63,21	64,17	68,83	76,07
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kecil Menengah dan Aneka	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.1	Utilisasi Sektor Industri Aneka	Dit IAKSK	Persen	-	64,53	66,09	71,89	80,60
Indikator Kinerja SS	SS1.6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	BSKJI	Persen	3	4	5	6	7
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BSKJI						
Indikator Kinerja Sasaran Program	SP1.1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	PIH	Persen	3	4	5	6	7
Indikator Kinerja SS	SS1.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	BPSDMI	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPVI	Persen	50	77	79	81	83
Indikator Kinerja SS	SS1.8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	BPSDMI	Orang	17.000	85.000	90.000	95.000	100.000 (kumulatif)
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.5	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	17.000	85.000	90.000	95.000	100.000 (kumulatif)
Sasaran Strategis	SS2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>							
Indikator Kinerja SS	SS2.1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0</i>	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT	Perusahaan	30	36	44	52	60
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Agro	Ditjen IA						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri agro	Dit IMHLP dan Dit Mintemgar	Perusahaan	11	13	15	18	21
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IMATAP	Perusahaan	8	10	14	16	18
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0 di sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	Perusahaan	11	13	15	18	21
Indikator Kinerja SS	SS2.2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA	Persen	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> Sektor Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Dit IHHP	Persen	1,95	1,92	1,97	2,01	2,05
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Kontribusi ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika berteknologi tinggi	Dit IPAMP, Dit IET, Dit IL dan Dit IMATAP	Persen	5,87	5,72	5,87	5,98	6,11
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Kontribusi ekspor produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berteknologi tinggi	Dit IKHU, dan Dit IKHF	Persen	4,85	5,08	5,20	5,30	5,42
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor IKMA	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP2.3	Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi	Dit IAKSK	Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Indikator Kinerja SS	SS2.3	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	Ditjen IKMA	IKM	20	60	100	160	260
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor IKMA	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	PFBB, IAKSK, LMEA dan BPPI	IKM (Kumulatif)	20	60	100	160	260
Indikator Kinerja SS	SS2.1	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	Ditjen IKMA	IKM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor IKMA	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	PFBB, IAKSK, dan LMEA	IKM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	SS1.1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	BPSDMI	Orang	400	400	400	400	400
Sasaran Program	SP1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Pusdiklat Industri	Orang	400	400	400	400	400
Sasaran Strategis	SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri							
Indikator Kinerja SS	SS3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Semua Unit Eselon I	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Eselon II di Setjen	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Itjen						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Jenderal	Eselon II di Itjen	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro	Eselon II di Ditjen IA	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	S3.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal ILMATE	Eselon II di Ditjen ILMATE	Persen	NA	21,76	77	80	85
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Negeri	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP3.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Eselon II di Ditjen IKFT	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Aneka Dalam Negeri	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP3.3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ditjen IKMA	Eselon II di Ditjen IKMA	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	KPAII						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal KPAII	Eselon II Di Ditjen KPAII	Persen	-	75	80	85	90
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	BSKJI						
Indikator Kinerja Program	SP3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	Eselon II dan Satker Daerah di BSKJI	Persen	NA	72	75	78	80
Sasaran Program	SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Eselon II dan Satker Daerah di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	SS3.2	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA	Persen	14	22	35	35	35
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP3.2	Substitusi Impor Produk Industri Agro	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Persen	14	22	35	35	35
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP3.3	Substitusi Impor Produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IL	Persen	14	22	35	35	35
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Negeri	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Substitusi Impor Produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	Persen	14	22	35	35	35
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Kemampuan Industri Aneka Dalam Negeri	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Substitusi Impor Produk Industri Aneka	Dit IAKSK	Persen	14	22	35	35	35
Indikator Kinerja SS	SS3.3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP3.3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor Industri Agro	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Persen	54,75	58,54	59,71	60,91	62,12
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IL	Persen	48,56	49,53	50,52	51,53	52,57
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Negeri	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	Persen	35,79	36,51	37,24	37,98	38,74

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Aneka Dalam Negeri	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) sektor industri aneka	Dit IAKSK	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81
Indikator Kinerja SS	SS3.4	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Setjen	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Pusat P3DN	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)
Indikator Kinerja SS	SS2.1	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	BSKJI	Persen	5	7	10	15	20
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	BSKJI						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	P4SI	Persen	5	7	10	15	20
Indikator Kinerja SS	SS3.6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Setjen	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP2.3	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	PPIH	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5
Indikator Kinerja SS	SS3.7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	BSKJI	Persen	NA	60	65	70	75
Sasaran Program	SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	BSKJI						
Indikator Kinerja Program	SP3.3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	BSKJI	Persen	NA	60	65	70	75
Sasaran Strategis	SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri							
Indikator Kinerja SS	SS4.1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA	US\$ Miliar	131,08	134,21	145,50	160,64	181,59
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Nilai ekspor produk industri Agro	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	US\$ Miliar	48,60	51,79	56,14	62,61	72,59
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Nilai ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IL	US\$ Miliar	37,05	39,82	43,01	46,81	51,53
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Nilai ekspor produk industri kimia, farmasi, dan tekstil	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	US\$ Milyar	30,12	32,23	35,05	38,85	43,93
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri aneka	Ditjen IKMA						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Nilai ekspor produk industri aneka	Dit IAKSK	US\$ Miliar	10,38	10,36	11,30	12,36	13,54
Indikator Kinerja SS	SS4.2	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA	Persen	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP4.2	Pertumbuhan ekspor produk industri Agro	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Persen	0,28	6,58	8,39	11,53	15,94
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP4.2	Pertumbuhan ekspor sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IL	Persen	0,46	7,50	8,01	8,83	10,08
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Pertumbuhan ekspor produk industri kimia, farmasi dan tekstil	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	Persen	-6,90	6,98	8,74	10,87	13,06
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri aneka	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Pertumbuhan ekspor industri aneka	Dit IAKSK	Persen	3,47	4,51	5,93	7,07	7,97
Indikator Kinerja SS	SS4.3	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA	Persen	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP4.3	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Persen	31,0	28,9	29,1	29,6	30,6
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP4.3	Kontribusi ekspor produk sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Dit IMATAP, Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IL	Persen	23,61	22,21	22,30	22,15	21,71
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP4.2	Kontribusi ekspor produk industri kimia, farmasi dan tekstil terhadap total ekspor	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	Persen	18,9	18,0	18,2	18,4	18,5
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri aneka	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP4.2	Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor	Dit IAKSK	Persen	4,74	4,65	4,55	4,42	4,29
Indikator Kinerja SS	SS4.4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Ditjen KPAIL	Persen	27	28	29	30	32

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Ditjen KPAIL						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Dit All	Persen	27	28	29	30	32
Indikator Kinerja SS	SS4.5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT dan Ditjen IKMA	Persen	40,22	39,07	38,05	37,08	36,12
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro	Ditjen IA						
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	Dit IHHP, Dit IMHLP, dan Dit Mintemgar	Persen	5,95	5,77	5,61	5,44	5,27
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Ditjen ILMATE						
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Rasio impor bahan baku industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika terhadap PDB sektor industri nonmigas	Dit IMATAP, Dit IPAMP, Dit IET, dan Dit IL	Persen	11,60	11,17	10,76	10,38	9,99
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Ditjen IKFT						
Indikator Kinerja Program	SP4.3	Rasio impor bahan baku industri Kimia, Farmasi dan Tekstil terhadap PDB sektor industri nonmigas	Dit IKHU, Dit IKHF, Dit ITKAK, dan Dit ISKPBGNL	Persen	18,84	18,45	18,14	17,85	17,59
Sasaran Program	SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri aneka	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP4.3	Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas	Dit IAKSK	Persen	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32
Sasaran Strategis	SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)							
Indikator Kinerja SS	SS5.1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Ditjen IKMA	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20
Sasaran Program	SP5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	PFBB, IAKSK, LMEA, Setditjen IKMA	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20
Indikator Kinerja SS	SS5.2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	Ditjen IKMA	WUB	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000
Sasaran Program	SP5.2	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	PFBB, IAKSK, LMEA, Setditjen IKMA	WUB (Kumulatif)	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000
Indikator Kinerja SS	SS5.3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	Ditjen IKMA	IKM	40	80	120	160	200
Sasaran Program	SP5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP5.3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	PFBB, IAKSK, dan LMEA	IKM (Kumulatif)	40	80	120	160	200
Indikator Kinerja SS	SS5.4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Ditjen IKMA	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP5.4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Setditjen IKMA	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5
Sasaran Strategis	SS6	Meningkatnya Persebaran Industri							
Indikator Kinerja SS	SS6.1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Ditjen KPAIL	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Persebaran Industri	Ditjen KPAIL						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Dit PI	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)
Indikator Kinerja SS	SS6.2	KI yang dikembangkan	Ditjen KPAIL	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Persebaran Industri	Ditjen KPAIL						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	KI yang dikembangkan	Dit PI	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)
Indikator Kinerja SS	SS6.3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	Ditjen KPAIL	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Persebaran Industri	Ditjen KPAIL						
Indikator Kinerja Program	SP2.3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	Dit PI	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)
Indikator Kinerja SS	SS6.4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Ditjen KPAIL	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
Sasaran Program	SP2	Meningkatnya Persebaran Industri	Ditjen KPAIL						
Indikator Kinerja Program	SP2.4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Dit PI	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
Indikator Kinerja SS	SS6.5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Ditjen IKMA	Sentra IKM	17	23	29	38	44
Sasaran Program	SP6	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA						
Indikator Kinerja Program	SP6.1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Set Ditjen IKMA	Sentra IKM	17	23	29	38	44
Sasaran Strategis	SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
Indikator Kinerja SS	SS7.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Semua Unit Eselon I	Persen	72	74	76	78	80
Sasaran Program	SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP1.2	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Rokum	Persen	72	74	76	78	80
Indikator Kinerja SS	SS7.2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Setjen	Persen	NA	60	65	70	75
Sasaran Program	SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP1.3	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Rokum	Persen	NA	60	65	70	75

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis	SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
Indikator Kinerja SS	SS8.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	BSKJI	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)
Sasaran Program	SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BSKJI						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	PIH	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)
Indikator Kinerja SS	SS8.2	Infrastruktur kompetensi industri	BPSDMI	SKKNI	8	10	10	10	10
Sasaran Program	SP3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	Pusdiklat Industri	SKKNI	8	8	10	10	10
Sasaran Strategis	SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
Indikator Kinerja SS	SS9.1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Itjen	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1
Sasaran Program	SP1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Itjen						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	lr 1, lr 2, lr 3, dan lr 4	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1
Indikator Kinerja SS	SS9.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Semua Unit Eselon I	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Program	SP1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Itjen						
Indikator Kinerja Program	SP1.4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	lr 1, lr 2, lr 3, lr 4 dan Set Itjen	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Program	SP5	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	BSKJI						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Set BSKJI, Balai Besar, BPJI, BSI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Indikator Kinerja SS	SS9.3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Semua Unit Eselon I	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Program	SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Itjen						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	lr 1, lr 2, lr 3, lr 4, dan Set Itjen	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Program	SP5	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	BSKJI						
Indikator Kinerja Program	SP5.2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) BSKJI	Sekretariat BSKJI, Balai Besar, BPJI, BSI	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Strategis	SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian							
Indikator Kinerja SS	SS10.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Semua Unit Eselon I	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Program	SP6	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP6.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Ro OSDM	Indeks	70	71	73	76	80

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS	SS10.2	Persentase lulusan pelatihan dengan predikat minimal baik	BPSDMI	Persen	80	82	85	87	90
Sasaran Program	SP3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP3.4	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Pusdiklat SDM Aparatur	Persen	80	82	85	87	90
Sasaran Strategis	SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas							
Indikator Kinerja SS	SS11.1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Setjen	Skala (1-4)	3	3,1	3,12	3,15	3,18
Sasaran Program	SP9	Tersedianya data dan informasi industri yang berkualitas	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP9.1	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Pusdatin	Skala (1-4)	3	3,1	3,12	3,15	3,18
Indikator Kinerja SS	SS11.2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Setjen	Persen	78	80	83	85	88
Sasaran Program	SP9	Tersedianya data dan informasi industri yang berkualitas	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP9.2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Pusdatin	Persen	78	80	83	85	88
Sasaran Strategis	SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
Indikator Kinerja SS	SS12.1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Setjen	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	SP4	Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana kemenperin yang efektif dan efisien	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Rokeu	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indikator Kinerja SS	SS12.2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8
Sasaran Program	TJ	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif dan efisien	Setjen						
Indikator Kinerja Program	TJ1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Rokeu	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8
Sasaran Strategis	SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel							
Indikator Kinerja SS	SS13.1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Setjen	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3
Sasaran Program	SP5	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, dan evaluasi kinerja industri	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Rocana	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3
Indikator Kinerja SS	SS13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Semua Unit Eselon I	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8
Sasaran Program	SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	Setjen						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Rocana	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8

Tabel 3
Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional						
Tj.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	4,3	-2,52	3,56	5,26	7,70	8,40
Definisi/Deskripsi							

Definisi/Deskripsi

Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri, dan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas.

PDB industri pengolahan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan dalam jangka waktu tertentu. PDB industri pengolahan terdiri dari sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan sektor industri pengolahan nonmigas yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Perindustrian mengupayakan peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas setiap tahunnya.

Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya.

Sumber Data

Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Cara Menghitung (Formula)

Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas = $(\text{PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode } (t) - \text{PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode } (t-1)) / \text{PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode } (t-1) \text{ dikali } 100\%$.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA

Kode	Indikator Kinerja			Baseline 2019	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional								
Tj.2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB			17,5	17,89	17,81	17,95	18,40	18,90

Definisi/Deskripsi

Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 2015-2019, sektor industri pengolahan nonmigas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan PDB nasional sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan nonmigas terus didorong dapat tumbuh pesat.

Sumber Data

Data distribusi PDB yang dipublikasikan oleh BPS.

Cara Menghitung (Formula)

Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB dihitung dengan membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan Nonmigas dengan total PDB Atas Dasar Harga Berlaku dikali 100%.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,9	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Definisi/Deskripsi							
Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi <i>leading sector</i> yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas.							
Sumber Data							
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas dari Sakernas yaitu KBLI 10-18 dan 20-33.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Juta Orang	Maksimasi	BPSPDMI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja	14,9	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
Definisi/Deskripsi							
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional.							
Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas.							
Sumber Data							
Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	BPSPDMI					

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas									
S1.3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas				109,1	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
Definisi/Deskripsi										
Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional.										
Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.										
Sumber Data										
Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin.										
Cara Menghitung (Formula)										
Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas.										
Satuan		Klasifikasi			Penanggung Jawab Data					
Rp. Juta/Orang/Tahun		Maksimasi			BPSPDMI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.4	Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas	215,9	245,96	255,29	334,90	544,59	613,85
Definisi/Deskripsi							
Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).							
Sumber Data							
Data investasi yang dipublikasikan oleh BKPM.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah investasi PMA dan PMDN sektor industri pengolahan nonmigas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33).							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Rp. Triliun		Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT, IKMA dan KPAIL				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.5	Utilisasi Sektor Industri	64.86	64.86	61,55	64,46	69,86	77,52
Definisi/Deskripsi							
Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan pemulihan sektor industri adalah utilisasi. Utilisasi menggambarkan perbandingan/rasio realisasi produksi terhadap kapasitas produksi.							
Sumber Data							
Data utilisasi berasal dari industri yang disampaikan melalui SIINas.							
Cara Menghitung (Formula)							
Dihitung berdasarkan total produksi dibagi kapasitas nasional.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	2	3	4	5	6	7
Definisi/Deskripsi							
Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi dan air. Perusahaan industri yang dipilih adalah yang telah memiliki sertifikasi industri hijau. Peningkatan efisiensi ini dapat terjadi 1-2 tahun setelah sertifikasi dan implementasi, dimana PIH dan atau Ditjen sektor berperan memberikan fasilitas sertifikasi.							
Sumber Data							
Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINAS dan data verifikasi lapangan auditor Industri Hijau.							
Cara Menghitung (Formula)							
Persentase efisiensi penggunaan energi dan penggunaan air sebelum (A) dan penggunaan energi dan penggunaan air setelah sertifikasi industri hijau (B). Formula: $(B-A)/A \times 100\%$ (nilai negatif menandakan terjadi efisiensi)							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persentase	Maksimasi	BSKJI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
S1.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	63	50	77	79	81	83
Definisi/Deskripsi							
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan di regional ASEAN sejak tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemagangan. Presentase lulusan program studi keteknikan industri ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan program studi keteknikan industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.							
Sumber Data							
Data presentase lulusan program studi keteknikan industri dari BPSDMI,							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah siswa didik yang berhasil lulus program studi keteknikan industri dibagi jumlah seluruh siswa didik yang mengikuti ujian kelulusan program studi keteknikan industri dikali 100%,							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		BPSDMI			

Kode	Indikator Kinerja					Baseline 2019	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
S1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas										
S1.8	Lulusan Pelatihan Vokasi Industri berbasis kompetensi					35.000	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
Definisi/Deskripsi											
Program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten dengan dilatih kemudian disertifikasi dan lulusannya langsung ditempatkan dan bekerja di sektor industri. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan). Jumlah lulusan pelatihan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) pada 7 Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.											
Sumber Data											
Database Jumlah lulusan diklat dan tenaga kerja yang terserap oleh industri dari BPSDMI											
Cara Menghitung (Formula)											
Menghitung jumlah peserta diklat 3 in 1 pada Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri pada tahun berjalan											
Satuan		Klasifikasi				Penanggung Jawab Data					
Orang		Maksimasi				BPSDMI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
S2.1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) ≥ 3.0	24	30	36	44	52	60
Definisi/Deskripsi							
INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (<i>management and organization</i>), orang dan budaya (<i>people and culture</i>), produk dan layanan (<i>product and services</i>), teknologi (<i>technology</i>), dan operasi pabrik (<i>factory operation</i>). Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari : - Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0; - Level 1 : tahap kesiapan awal; - Level 2 : tahap kesiapan sedang; - Level 3 : tahap kesiapan matang; dan - Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0. Penilaiannya menggunakan mekanisme <i>self-assessment</i> oleh perusahaan dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut.							
Sumber Data							
Hasil pengolahan data <i>Assesment</i> INDI 4.0 dari SIINAS							
Cara Menghitung (Formula)							
Dengan melakukan <i>assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang telah di tentukan.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Perusahaan		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	12,86	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70
Definisi/Deskripsi							
Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan pengembangannya (<i>research and development (R&D)</i>) tinggi untuk menghasilkan suatu produk*. Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk R&D terhadap nilai tambah bruto tinggi. Produk-produk industri berteknologi tinggi berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKFT.							
*Definisi diambil dari referensi UNIDO, OECD dan WITS.							
Sumber Data							
Data ekspor sektor industri yang dipublikasikan oleh BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari 1530 HS produk industri berteknologi tinggi dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.3	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	NA	20	60	100	160	260
Definisi/Deskripsi							
IKM <i>startup</i> berbasis teknologi yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru berbasis teknologi.							
Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM berbasis teknologi melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, kompetisi bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif.							
Sumber Data							
Data IKM <i>startup</i> berbasis teknologi dari Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah Wirausaha IKM berbasis teknologi							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
IKM		Maksimasi		Ditjen IKMA			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
S2.4	Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	NA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Definisi/Deskripsi							
Pelaku IKM yang memperoleh peningkatan teknologi informasi ataupun kemampuan literasi digital yang sesuai dengan ekosistem lingkungan bisnis IKM.							
Sumber Data							
Data IKM Yang Mengikuti Program Esmart IKM Di Ditjen IKMA							
Cara Menghitung (Formula)							
IKM Yang memperoleh peningkatan pengetahuan, keahlian dan memanfaatkan teknologi informasi ataupun literasi digital seperti <i>e-commerce</i> , aplikasi keuangan digital maupun aset digital lainnya							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
IKM	Maksimasi	Ditjen IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024			
S2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>									
S2.5	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang meningkatkan kompe-tensinya	205	400	400	400	400	400			
Definisi/Deskripsi										
Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya merupakan ASN dan Tenaga Kerja Industri yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Diklat terdiri atas diklat: <i>Awareness Industry 4.0</i> , Infografis, dan Transformasi Industri 4.0.										
Sumber Data										
Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya dari BPSDMI.										
Cara Menghitung (Formula)										
Jumlah lulusan diklat 4.0 yang meningkat kompetensinya										
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data						
Orang		Maksimasi		BPSDMI						

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri						
S3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin	NA	NA	75	80	85	90

Definisi/Deskripsi

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Sumber Data

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Cara Menghitung (Formula)

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus:

$$RP_{3DN} = \frac{RAP_{3DN}}{TotAP_{3DN}}$$

Ket:

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin

RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Semua Unit Eselon I

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri									
S3.2	Substitusi Impor Produk Indus-tri Pengolahan Nonmigas				NA	14	22	35	35	35

Definisi/Deskripsi

Kebijakan Substitusi impor merupakan langkah yang ditempuh pemerintah untuk menekan impor. Penerapan kebijakan tersebut bisa membantu menekan defisit neraca perdagangan. Substitusi impor merupakan hal penting untuk dilakukan demi mengurangi ketergantungan terhadap barang modal dan bahan baku, serta melengkapi struktur pohon industri. Kebijakan substitusi impor di implementasikan pada sektor industri yang dirasa telah mampu bersaing dengan produk luar negeri, sehingga barang hasil produksi dalam negeri dapat mensubstitusi produk-produk impor dengan kualitas yang sama bagus.

Sumber Data

Data impor sektor industri pengolahan nonmigas dari BPS, sesuai dengan kode HS 8 digit yang telah di usulkan oleh sektor pembina serta disepakati bersama di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung (Formula)

Nilai impor tahun 2019 digunakan sebagai baseline perhitungan penurunan nilai impor dibandingkan dengan periode yang sama pada saat perhitungan itu dilakukan, atau dapat ditampilkan dengan rumus:

$$SI_n = \frac{(Impor_n - Impor_{2019})}{Impor_{2019}}$$

Ket: SIn = Capaian Substitusi Impor Tahun n

Impor_n = Nilai impor berdasarkan kode HS tertentu pada tahun n

Impor₂₀₁₉ = Nilai impor berdasarkan kode HS tertentu pada tahun 2019

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	IA, ILMATE, IKFT dan IKMA

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri						
S3.3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	48,1	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0
Definisi/Deskripsi							
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.							
Sumber Data							
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai rata-rata berdasarkan nilai sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri						
S3.4	Produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	6.097	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400
Definisi/Deskripsi							
Produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku merupakan jumlah kumulatif produk industri yang tersertifikasi sampai dengan tahun berjalan. Jumlah produk industri yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai capaian $\geq$ 25% yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Dijelaskan pada pasal 64 ayat 1, produk industri mendapatkan hak untuk diberikan preferensi harga. Produk industri mendapatkan hak untuk diberikan preferensi harga jika memiliki nilai TKDN dengan nilai capaian $\geq$ 25%. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku minimal sebanyak 8.400 pada akhir Tahun 2024.							
Sumber Data							
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Cara Menghitung (Formula)							
Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan kumulatif produk industri yang tersertifikasi TKDN dengan nilai minimal sama dengan 25 persen yang masih berlaku sampai dengan akhir tahun berjalan. Dimana jumlah ini didapatkan dari daftar inventarisasi yang dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id).							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Produk	Maksimasi	Sekretariat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri						
S3.5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	3	5	7	10	15	20
Definisi/Deskripsi							
Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan SNI wajib diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak pemberlakuan perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Dengan berkurangnya impor produk dengan kualitas di bawah standar, selain menjamin keamanan konsumen, diharapkan industri dalam negeri dapat mengisi kebutuhan domestik tersebut. Persentase jumlah SNI yang dimaksud adalah persentase jumlah SNI yang diterapkan dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan.							
Sumber Data							
Hasil evaluasi Pusat Standardisasi Industri							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah akumulatif SNI baik wajib maupun sukarela yang dapat diterapkan, lalu hasilnya dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. Baseline total SNI aktif tahun 2019 adalah 4600 SNI, sehingga <i>baseline</i> SNI yang diterapkan adalah 138 SNI atau 3%. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Maksimasi	BSKJI				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri						
S3.6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	NA	NA	2,75	3	3,25	3,5
Definisi/Deskripsi							
Indikator kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal. Kuesioner berisi pertanyaan tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait industri halal dan implikasi promosi dan kampanye terhadap pemberdayaan industri halal							
Sumber Data							
Kuesioner data primer							
Cara Menghitung (Formula)							
Tanggapan terhadap kuesioner dalam tiap kategori terbagi menjadi 4 (empat) tingkat : 3,1-4,0 = Sangat Paham 2,1-3,0 = Paham 1,1-2,0 = Kurang Paham 0,0-1,0 = Tidak Paham Nilai Akhir = $\frac{\text{Akumulasi nilai tiap kategori}}{\text{Jumlah Kategori}}$							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Skala 1-4		Maksimasi		Sekretariat Jenderal			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Pemberdayaan Industri Halal Dalam Negeri						
S3.7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	NA	NA	60	65	70	75

Definisi/Deskripsi
Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk melaksanakan penerapan teknologi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa konsultasi melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.

Sumber Data
Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri)

Cara Menghitung (Formula)
Data yang diperlukan adalah nilai ukuran performansi yang diukur sebelum penerapan (A) dan nilai ukuran performansi setelah penerapan (B), lalu dihitung jumlah perusahaan yang naik produktivitas/efisiensinya (B > A) dibagi dengan total jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI.

$$\text{Nilai indikator} = \frac{\text{jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{jumlah peserta DAPATI}} \times 100\%$$

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	BSKJI

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri									
S4.1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	126,6	131,08	134,21	145,50	160,64	181,59			

Definisi/Deskripsi
Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan BPS.
Sumber Data
Data ekspor produk industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.
Cara Menghitung (Formula)
Berdasarkan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas dari BPS.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
US\$ Miliar	Maksimasi	Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA

Kode	Indikator Kinerja				Baseline 2019	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri									
S4.2	Pertumbuhan nonmigas	ekspor industri pengolahan	(2,7)	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05		
Definisi/Deskripsi										
Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai peningkatan penguasaan pasar industri sektor industri, salah satunya diukur melalui pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas. Target pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas tahun 2021 dihitung berdasarkan target tahun 2020 pada Rapat Koordinasi Pembahasan Penyesuaian Target Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2020—2024 dengan target sebesar US\$ 125,31 Milyar.										
Sumber Data										
Data ekspor industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.										
Cara Menghitung (Formula)										
Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas = (Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t) – Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1))/Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1) dikali 100%.										
Satuan		Klasifikasi			Penanggung Jawab Data					
Persen		Maksimasi			Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
S4.3	Kontribusi ekspor produk indus-tri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	75,6	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49
Definisi/Deskripsi							
Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri.							
Sumber Data							
Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri Pengolahan nonmigas dibagi total Ekspor Nasional dikali 100%.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
S4.4	Penambahan jenis produk indus-tri pengolahan nonmigas yang di ekspor	26,8	27	28	29	30	32
Definisi/Deskripsi							
Salah satu upaya meningkatkan ekspor produk industri manufaktur yaitu dengan memperbanyak jenis produk yang diekspor (diversifikasi). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tarif preferensi guna mengekspor produk ke negara mitra FTA/PTA/EPA. Semakin bertambahnya jenis produk yang di ekspor menggunakan tarif preferensi mengindikasikan semakin banyak produk industri nasional yang diterima oleh negara-negara lain, baik sebagai bahan baku, komponen, maupun produk akhir.							
Sumber Data							
Data jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor menggunakan tarif preferensi dari Kementerian Perdagangan.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor menggunakan tarif preferensi dibagi total jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor (ke negara mitra FTA/PTA/EPA) kali 100%.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ditjen KPAIL					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri						
S4.5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	37,98	40,22	39,07	38,05	37,08	36,12
Definisi/Deskripsi							
Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas diharapkan semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki nilai tambah.							
Sumber Data							
Data impor bahan baku sektor industri dan PDB sektor industri nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai impor Bahan Baku Sektor Industri dibagi PDB Harga Berlaku Sektor Industri Nonmigas dikali 100%.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Minimasi	Ditjen IA, IKFT, ILMATE, IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah in-dustri pengolahan nonmigas	18,50	18,50	18,80	19,20	19,60	20
Definisi/Deskripsi							
Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas.							
Sumber Data							
Data Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas oleh BPS diolah Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	7.986	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000
Definisi/Deskripsi							
Wirausaha industri kecil yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru. Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif. Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha.							
Sumber Data							
Data wirausaha industri kecil dari Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Wira Usaha Baru (WUB)		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	NA	40	80	120	160	200
Definisi/Deskripsi							
Penguatan Kewirausahaan dan IKM dapat diindikasikan dengan banyaknya IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya. Kriteria perhitungan IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya adalah jumlah IKM yang melakukan penajakan kerjasama, perjanjian, dan kontrak.							
Sumber Data							
Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
IKM		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
S5.4	Proporsi nilai penyaluran pin-jaman perbankan kepada IKM	2,2	2,40	2,75	3,35	4,05	5
Definisi/Deskripsi							
Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM adalah nilai pinjaman kepada IKM dibandingkan dengan total nilai penyaluran pinjaman							
Sumber Data							
Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM dari Bank Indonesia (BI).							
Cara Menghitung (Formula)							
Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM berdasarkan data BI.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Persen		Maksimasi	Ditjen IKMA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.1	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	8	11	13	15	16	17
Definisi/Deskripsi							
KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi merupakan KI yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) efektif. KI yang beroperasi di luar Jawa dimungkinkan sama dari tahun ke tahun dan sudah memiliki <i>anchor industry</i> . Jumlah KI yang beroperasi merupakan kumulatif, sehingga menunjukkan jumlah KI yang telah difasilitasi perizinannya. Pada RPJMN tahun 2020-2024, ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) KI prioritas di luar Jawa telah memiliki IUKI efektif, meliputi: Teluk Weda, Galang Batang, Ketapang, Bintang <i>Aerospace</i> , Takalar, Tanggamus, Ladong, Tanjung Enim, dan Sadai.							
Sumber Data							
Data KI dari Ditjen KPAIL.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah KI yang telah memiliki IUKI efektif.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
KI		Maksimasi	Ditjen KPAIL				
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.2	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	15	18	22	26	30	33
Definisi/Deskripsi							
KI yang dikembangkan merupakan kawasan-kawasan yang difasilitasi. Pemenuhan terhadap infrastruktur dasar dan penunjangnya merupakan prasyarat bagi pengembangan KI ke depannya. Dalam periode 2020 – 2024, target pengembangan KI baru berjumlah 18 KI, meliputi: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tenayan, Tanjung Buton, Kemingking, Way Pisang, Katibung, Pesawaran, Batanjung, Surya Borneo, Jorong, Batu Licin, Tanah Kuning, Brebes, Palu, Bangkalan, Sumbawa Barat, dan Teluk Bintuni.							
Sumber Data							
Data KI dari Ditjen KPAIL.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah KI yang difasilitasi pemenuhan infrastrukturnya.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
KI		Maksimasi	Ditjen KPAIL				
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.3	Kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi	N/A	2	2	3	3	3
Definisi/Deskripsi							
KI dengan zona tematik merupakan KI yang telah ada/beroperasi (<i>existing</i>) yang menyediakan layanan berdasarkan fungsi-fungsi spesifik. Dengan adanya tambahan fungsi spesifik tersebut, KI dengan zona tematik memiliki kekhususan yang tidak dimiliki KI lain. Pengembangan KI dengan zona tematik disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam hal: pemenuhan standar tertentu (misal: halal), manajemen pengelolaan (misal: limbah), teknologi, dan lain-lain.							
Sumber Data							
Data KI dari Ditjen KPAIL.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah KI yang memenuhi unsur tematik.							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
KI		Maksimasi	Ditjen KPAIL				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	29,55	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
Definisi/Deskripsi							
Peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa menunjukkan adanya penyebaran pembangunan industri di luar Jawa. Hal-hal yang memicu semakin meningkatnya kontribusi nilai tambah di luar Jawa perbaikan infrastruktur, ketersediaan energi (gas dan listrik) dan peningkatan SDM/tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur mulai bertumbuh di luar Jawa. Pembangunan kawasan industri prioritas di luar Jawa memberikan dampak positif bagi peningkatan kontribusi sektor industri. Dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Prioritas diharapkan ke depannya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional meningkat.							
Sumber Data							
Data nilai tambah regional dari BPS.							
Cara Menghitung (Formula)							
Nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa dibandingkan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas secara nasional.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ditjen KPAIL					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S6	Meningkatnya Persebaran Industri						
S6.5	Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	14	17	23	29	38	44
Definisi/Deskripsi							
Sentra IKM di luar Jawa yang dibangun dan beroperasi, merupakan jumlah sentra IKM yang difasilitasi dan/atau dibangun di luar Jawa dan sampai dengan beroperasi. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Per-industrian di mana disebutkan bahwa pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang diarahkan untuk mendukung industri besar dan pengembangan WPPI atau sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. Pengembangan sentra IKM dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sentra IKM.							
Sumber Data							
Database Ditjen IKMA.							
Cara Menghitung (Formula)							
Data sentra IKM di luar Jawa yang beroperasi dari Ditjen IKMA.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Sentra IKM	Maksimasi	Ditjen IKMA					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif						
S7.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	NA	72	74	76	78	80

Definisi/Deskripsi							
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin.							
Sumber Data							
Semua unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian							

Cara Menghitung (Formula)							
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin didapatkan dari hasil movev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:							
$E_r = \frac{SR_e}{T_s}$							
Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan							

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Semua Unit Eselon I

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif						
S7.2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perun-dang-undangan	NA	NA	60	65	70	75

Definisi/Deskripsi							
Dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terencana, terpadu, dan sistematis, dibuatlah Program Penyusunan Prioritas Tahunan Kementerian Perindustrian (Progsun Kementerian Perindustrian) yang merupakan instrument perencanaan pembentukan hukum dilingkungan Kementerian Perindustrian. Dengan adanya Progsun tersebut, dapat diidentifikasi lebih dini terkait dengan instrument hukum prioritas untuk segera dibentuk.							
Sumber Data							
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal							
Cara Menghitung (Formula)							

Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan =							
$\frac{\text{Jumlah Peraturan Menteri Perindustrian yang ditetapkan berdasarkan perencanaan}}{\text{Jumlah Peraturan Menteri Perindustrian yang direncanakan untuk ditetapkan berdasarkan Progsun Kemenperin}} \times 100 \%$							

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024			
S8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan									
S8.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	28	33	37	46	61	71			

Definisi/Deskripsi

Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi SIH berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH.

Jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH dibandingkan dengan jumlah industri menengah besar pada KBLI SIH yang telah ditetapkan (untuk 8 SIH di 2019 terdapat 210 perusahaan).

Sumber Data

Data sertifikat yang diterbitkan Lembaga SIH.

Cara Menghitung (Formula)

Menghitung jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH. Jumlah tersebut lalu dibagi target perusahaan sesuai lingkup SIH di tahun berjalan. Asumsi terdapat penambahan 5 SIH (100 perusahaan) pertahun. Perhitungan target (2020 → 28/310, 2021 → 37/410, 2022 → 46/510, 2023 → 61/610, 2024 → 71/710).

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Perusahaan	Maksimal	BSKJI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
S8.2	Infrastruktur kompetensi indus-tri	13	8	10	10	10	10

Definisi/Deskripsi

Infrastruktur kompetensi industri merupakan penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan serta LSP dan TUK yang terbentuk di bidang industri pada tahun berjalan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan dan/atau keahlian (*skills*) serta sikap kerja (*attitude*) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat kompetensi. Sedangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi.

Sumber Data

Data infrastruktur kompetensi industri dari BPSDMI.

Cara Menghitung (Formula)

Jumlah SKKNI yang tersusun dan disahkan oleh BNSP.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
SKKNI	Maksimal	BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
S9.1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,089	1,5	1,4	1,3	1,20	1,00
Definisi/Deskripsi							
Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total anggaran Kementerian Perindustrian. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi <i>minimize</i> (semakin kecil lebih baik).							
Sumber Data							
Data hasil pemeriksaan BPK.							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah Temuan eksternal yang bersifat keuangan dibanding dengan total anggaran Kementerian Perindustrian.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Minimasi		Inspektorat Jenderal			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
S9.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	90	91	91,5	92	92,5	93
Definisi/Deskripsi							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
Sumber Data							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, database Itjen							
Cara Menghitung (Formula)							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Semua Unit Eselon I					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
S9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
S9.3	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	NA	3	3	3	4	4	
Definisi/Deskripsi								
Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.								
Sumber Data								
- Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP.								
Cara Menghitung (Formula)								
Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.								
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Level		Maksimasi	Semua Unit Eselon I					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
S10.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	NA	70	71	73	76	80
Definisi/Deskripsi							
Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
Sumber Data							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).							
Satuan		Klasifikasi	Penanggung Jawab Data				
Indeks		Maksimasi	Semua Unit Eselon I				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian						
S10.2	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	80	82	85	87	90
Definisi/Deskripsi							
Dalam rangka memenuhi kewajiban Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti program rintisan gelar/diklat fungsional/diklat teknis.							
Sumber Data							
Data ASN yang meningkat kompetensinya melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDMI							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah Nilai/predikat ASN yang lulus Diklat Fungsional, Struktural, dan Teknis serta nilai lulusan Program Rintisan Gelar yang mendapatkan predikat minimal baik.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	BPSDMI					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
S11.1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	NA	3	3,1	3,12	3,15	3,18
Definisi/Deskripsi							
Indikator Kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kesesuaian data dan informasi industri yang dimiliki Pusdatin terhadap permintaan data dan informasi dari pimpinan di lingkungan Gedung Pusat Kementerian Perindustrian. Kuesioner berisi pertanyaan tentang tingkat keakuratan, kelengkapan dan kemudahan akses pimpinan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Arti nilai skala <i>likert</i>: Indeks 0,0 - 1,0 : Sangat Tidak Setuju; Indeks 1,1 - 2,0 : Tidak Setuju; Indeks 2,1 - 3,0 : Setuju; dan Indeks 3,1 - 4,0 : Sangat Setuju.							
Sumber Data							
Hasil kuisioner dari Pusdatin Kemenperin.							
Cara Menghitung (Formula)							
Pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Pimpinan (Eselon III) di Gedung Pusat Kementerian Perindustrian pada bulan Januari dan Juli.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Skala (1-4)		Maksimasi		Sekretariat Jenderal			

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas						
S11.2	Tingkat ketepatan waktu pen-yampaian informasi baku secara periodik	NA	78	80	83	85	88

Definisi/Deskripsi

Ketepatan waktu dalam mengunggah 26 informasi (secara kumulatif sampai dengan tahun 2024) sesuai amanat PP Nomor 2/2017 sebagai informasi baku ke dalam website kemenperin.go.id. Pengunggahan dilakukan secara periodik: (i) bulanan: ekspor-impor (10 hari setelah rilis BPS); (ii) triwulanan: perkembangan investasi industri (10 hari setelah rilis BKPM); dan (iii) tahunan 24 informasi lainnya (paling lambat 31 Desember tahun berjalan) dengan rincian jumlah informasi yang harus diunggah pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020: 23 informasi (informasi industri dan kawasan industri; informasi ekspor dan impor; informasi agenda pameran nasional dan internasional; informasi hak kekayaan intelektual; informasi investasi; informasi potensi sumber daya wilayah; informasi sumber daya manusia industri; informasi standarisasi industri; informasi infrastruktur industri; informasi kebijakan industri; informasi hasil riset terapan; informasi keunggulan sumber daya daerah; informasi sumber daya alam; informasi kebijakan perdagangan; informasi tentang permintaan informasi dagang; informasi rancang bangun dan perekayasa industri; informasi jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi; informasi rencana tata ruang wilayah; informasi penyediaan sumber pembiayaan; informasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; informasi hasil audit teknologi; informasi sumber daya manusia industri; informasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri).
- Tahun 2021: 26 informasi (23 informasi di tahun 2020 ditambah informasi konsumsi produk industri, informasi usaha bersama pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/atau kerja sama teknologi, informasi peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai).
- Tahun 2022: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.
- Tahun 2023: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.
- Tahun 2024: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.

Sumber Data

Website Kemenperin

Cara Menghitung (Formula)

$$\text{Persentase ketepatan waktu} = \frac{\text{Total informasi baku yang diunggah tepat waktu pada tahun tersebut}}{\text{Total informasi baku yang harus diunggah pada tahun tersebut}} \times 100\%$$

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimal	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima						
S12.1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Definisi/Deskripsi

Merupakan tingkat kualitas laporan keuangan dan BMN yang dipublikasikan oleh BPK. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Sumber Data

Hasil audit dari Kementerian Keuangan.

Cara Menghitung (Formula)

Nilai WTP diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPK.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Predikat	Maksimal	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
S12.2	Indeks reformasi birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	76,91	78	78,3	78,6	78,7	78,8

Definisi/Deskripsi

Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan *Grand Design* pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: area manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, dan penguatan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian reformasi birokrasi K/L merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilaksanakan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun.

Sumber Data

Data Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

Cara Menghitung (Formula)

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dengan menilai 8 area perubahan yang dilakukan oleh tim dari KemenPANRB. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*).

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Nilai	Maksimasi	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
S13.1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,7	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3

Definisi/Deskripsi

Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen *trilateral meeting*.

Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

Sumber Data

Dokumen *Trilateral Meeting* antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan dan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung (Formula)

Perbandingan *Trilateral Meeting* antara Kementerian Perindustrian dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian.

Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Sekretariat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel						
S13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindus-trian	77,12	78	78,2	78,4	78,6	78,8
Definisi/Deskripsi							
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.							
Sumber Data							
Data Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB.							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.							
Satuan		Klasifikasi		Penanggung Jawab Data			
Nilai		Maksimasi		Semua Unit Eselon I			

halaman ini sengaja dikosongkan

